

**PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN**

(Studi Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**SUKOWATI PINILIH
NIM 125030407111047**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

“Dalam setiap kondisi kritis ada jalan keluar. Ketika seorang melangkah, ia akan melihat jalan keluar. Ketika seorang tekun melangkah, ia akan mengalami mestakung (semesta mendukung).”

-Teori Mestakung, Prof. Yohanes Surya

“Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak sholeh.”

-HR. Muslim

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerukan Tuhan-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Maha Hak. Dia adalah sebaik-baiknya pemberi pahala dan sebaik-baiknya pemberi balasan.”

-Q.S. Al-Kahfi: 28 & 44.

*Untuk Bapak Sukardi dan Ibu Lina Janiari,
Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat untukku.*

*Dan untuk Mas Syukur Tatag Jumangkah,
Terima kasih telah menjadi adik yang memberiku begitu banyak pelajaran.*

*Ku persembahkan karya kecil ini kepadamu,
Semoga layak untuk menunjukkan rasa hormat dan sayangku.*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan (Studi Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan
Tahun 2010-2014)

Disusun oleh : Sukowati Pinilih

NIM : 125030407111047

Fakultas : Ilmu Administrasi

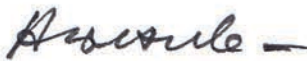
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

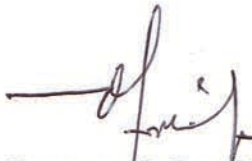
Malang, April 2016

Komisi Pembimbing

Ketua


Drs. Heru Susilo, MA
NIP. 19591210 1986011 001

Anggota


Arik Prasetya, S. Sos., M. Si., Ph. D
NIP. 19760209 2006041 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2016
Pukul : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Sukowati Pinilih
Judul : Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2014)

dan dinyatakan LULUS.

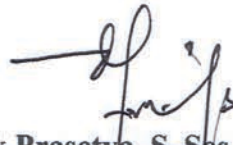
Majelis Penguji

Ketua



Drs. Heru Susilo, M. A
NIP. 19591210 198601 1 001

Anggota



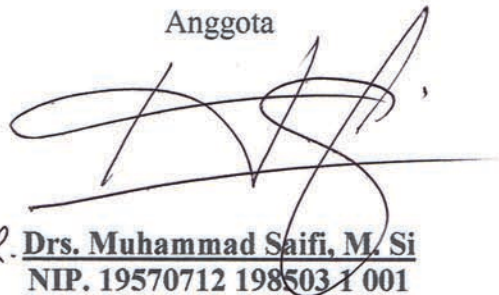
Arik Prasetya, S. Sps., M. Si., Ph. D
NIP. 19760209 200604 1 001

Anggota



Dr. Drs. M. Al Musadieq, MBA
NIP. 19580501 198403 1 001

Anggota



DR. Drs. Muhammad Saifi, M. Si
NIP. 19570712 198503 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, April 2016



Sukowati Pinilih

125030407111047

RINGKASAN

Sukowati Pinilih, 2016, Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2014). Drs. Heru Susilo, MA., Arik Prasetya, S. Sos., M. Si., Ph. D., 115 + xviii halaman.

Pemerintah Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dituntut untuk mampu menggali sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan Negara Indonesia didominasi oleh sektor pajak. Penerimaan pajak di Indonesia, terutama pajak penghasilan, dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal dari dalam lembaga perpajakan maupun secara eksternal seperti ekonomi makro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian ini menggunakan metode penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah website resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa *time series* selama periode 2010 hingga 2014 (5 tahun) dengan metode sampel jenuh berjumlah 60 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan koefisien determinasi 0,920. Artinya 92% penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro tersebut, dan sisanya 8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Serta tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Kata Kunci : Ekonomi Makro, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Penerimaan Pajak Penghasilan.

SUMMARY

Sukowati Pinilih, 2016, The effect of Macroeconomics Variable to Income Tax Revenue (Studies about Income Tax Revenue on 2010-2014), Drs. Heru Susilo, MA., Arik Prasetya, S. Sos., M. Si., Ph. D., 115 + xviii pages.

Indonesian government that is currently developing in all sectors is required to explore the source of national revenue. National revenues of Indonesia is dominated by the tax. Tax revenue in Indonesia, especially income tax, is influenced by several factors both internally from within the tax agency and externally as the macroeconomic variabels. This research is supposed to reveal the macroeconomic variabels such as economic growth, inflation, and BI rate and the effect on income tax revenue.

This research is an explanation research with quantitative approach. The research location is the official website of the Central Bureau of Statistics (www.bps.go.id) and the official website of Bank Indonesia (www.bi.go.id). The data that used is secondary data of time series during the period 2010 to 2014 (5 years) by the method of saturated sample of 60 samples. Data analysis technique that used is multiple linear regression analysis.

The results of this research show that macroeconomic variables such as economic growth, inflation, and BI Rate simultaneously and partially significant effect on income tax revenue. The amount of influence is shown by the determination coefficient 0.920. It means that 92% of income tax revenue is influenced by macroeconomic variables, and the remaining 8% is influenced by other variables that are not used in this research. Partially, economic growth has a positive and significant effect on income tax revenue. Inflation has a negative and significant effect on income tax revenue. As well as the BI rate of Bank Indonesia Certificates have a negative and significant effect on income tax revenue.

Keywords : Macroeconomics, Economic Growth, Inflation, BI Rate, Income Tax Revenue.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur atas rahmat dan karunia yang selalu Allah SWT limpahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” (Studi Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2014).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti yakin bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M. Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M. Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S. Sos., M. AB., selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Drs. Heru Susilo, M.A., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Arik Prasetya, S. Sos., M. Si., Ph. D., selaku Anggota Komisi Pemimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Karyawan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Sukardi, Ibu Lina Janiari, Mas Syukur Tatag Jumangkah, atas doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan serta dukungan moral dan finansial untuk peneliti selama menempuh perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. *Sister from another parents* Annas Nuril Qur'ani dan *Fairy Lady* Lia Fatra Iana Azza Rohmah atas bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada peneliti selama proses penelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Member Beverly Hills 954 yang telah memberikan dukungan dan “gangguan” selama peneliti menjalani perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman yang telah banyak membantu peneliti dalam proses pengerjaan skripsi: Febi, Jessica, Alfin, Mba Icha, Hari, Nicola, Mas Andika. Terima kasih atas kerja keras kalian membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Perpajakan 2012 yang telah menemani peneliti di bangku perkuliahan dan mendukung peneliti menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang membantu dan memberikan dukungan, masukan, dan kritik yang tidak bisa peneliti masukan satu per satu.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dukungan berupa kritik dan saran yang membangun peneliti butuhkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Malang, April 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pajak	
1. Pengertian Pajak	15
2. Fungsi Pajak	18
3. Jenis-jenis Pajak	18
4. Asas Pemungutan Pajak	20
5. Teori Pemungutan Pajak.....	21
C. Pajak Penghasilan	
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	22
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	22
3. Objek Pajak Penghasilan	24
4. Tarif Pajak Penghasilan.....	25
D. Ekonomi Makro	
1. Pengertian Ekonomi Makro.....	26
2. Variabel Ekonomi Makro	30
E. Pertumbuhan Ekonomi	
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	31
2. Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi.....	34
3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi	35

F. Inflasi	
1. Pengertian Inflasi	37
2. Jenis-jenis Inflasi	38
3. Penyebab Terjadinya Inflasi	38
4. Dampak Terjadinya Inflasi	39
G. Tingkat Suku Bunga	
1. Pengertian Tingkat Suku Bunga	41
2. Peranan Tingkat Suku Bunga dalam Perekonomian	42
3. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia	42
4. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia	43
H. Pengaruh Antar Variabel	
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	44
2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	45
3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	46
I. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis Data dan Sumber Data	51
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	51
E. Populasi dan Sampel	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Bank Indonesia	63
2. Badan Pusat Statistik	67
B. Statistik Deskriptif Data Penelitian	
1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	70
2. Inflasi (X_2)	72
3. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3)	73
4. Penerimaan Pajak Penghasilan (X_4)	74
C. Analisis Data Hasil Penelitian	
1. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas.....	75
b. Uji Multikolinearitas.....	76
c. Uji Heteroskedastisitas.....	77
d. Uji Autokorelasi.....	79
2. Analisis Regresi Linier Berganda Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga	

Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).....	80
3. Uji Hipotesis	
a. Uji F Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	82
b. Uji t Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	84
c. Koefisien Determinasi (R^2) Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).....	85
D. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Gambaran Kondisi Ekonomi Makro dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Indonesia	
a. Gambaran Kondisi Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	86
b. Gambaran Kondisi Inflasi (X_1).....	87
c. Gambaran Kondisi Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_1).....	88
d. Gambaran Kondisi Penerimaan Pajak Penghasilan (X_1).....	89
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Secara Simultan.....	90
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Secara Parsial	
a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	92
b. Pengaruh Inflasi (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).....	94
c. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).....	97
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penerimaan Negara Indonesia (Milyar Rupiah), 2011-2014	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan	25
Tabel 4. Definisi Operasional Variabel	53
Tabel 5. Hasil Keputusan Uji Autokorelasi	59
Tabel 6. Uji Multikolonieritas	77
Tabel 7. Uji Autokorelasi	79
Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda	80
Tabel 9. Uji F	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	48
Gambar 2. Model Hipotesis	48
Gambar 3. Struktur Organisasi Bank Indonesia.....	66
Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik.....	69
Gambar 5. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran 2010-2014	71
Gambar 6. Inflasi Tahun 2010-2014	72
Gambar 7. Tingkat Suku Bunga SBI 2010-2014	73
Gambar 8. Penerimaan PPh 2010-2014	74
Gambar 9. Uji Normalitas	76
Gambar 10. Uji Heteroskedastisitas	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Variabel X	108
Lampiran 2. Data Variabel Y	110
Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	112
Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik	112
Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	114
Lampiran 6. Curriculum Vitae	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berupaya melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pencapaian tujuan pembangunan akan lebih optimal apabila Indonesia memiliki dukungan dana yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menggali sumber penerimaan negara demi tercapainya tujuan pembangunan negara tersebut.

Sumber penerimaan Negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak dan sektor non-pajak. Sektor pajak meliputi penerimaan Pajak Dalam Negeri berupa Penghasilan Migas dan Non-migas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bea Perolehannya, Cukai, dan Pajak Lainnya serta Pajak Perdagangan Internasional berupa Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Dari sektor non-pajak, penerimaan negara diperoleh melalui Penerimaan Sumber Daya Alam berupa Minyak Bumi, Gas Alam, dan Sumber Daya Alam Lainnya, Bagian Laba BUMN, Surplus Bank Indonesia, Pendapatan Badan Layanan Umum, dan PNBP

Lainnya. Selain itu Pemerintah Indonesia juga memperoleh pendapatan dari hibah (Bank Indonesia, 2014).

Tabel 1. Penerimaan Negara Indonesia (Milyar Rupiah), 2011-2014

Sumber Penerimaan	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾
Penerimaan Dalam Negeri	992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
Penerimaan Perpajakan	723 307	873 874	980 518	1 148 365	1 310 219
Pajak Dalam Negeri	694 392	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
Pajak Penghasilan	357 045	431 122	465 070	538 760	591 621
Pajak Pertambahan Nilai	230 605	277 800	337 584	423 708	518 879
Pajak Bumi dan Bangunan	28 581	29 893	28 969	27 344	25 541
BPHTB	8 026	-1	0	0	0
Cukai	66 166	77 010	95 028	104 730	114 284
Pajak Lainnya	3 969	3 928	4 211	5 402	5 980
Pajak Perdagangan Internasional	28 915	54 122	49 656	48 421	53 915
Bea Masuk	20 017	25 266	28 418	30 812	33 937
Pajak Ekspor	8 898	28 856	21 238	17 609	19 978
Penerimaan Bukan Pajak	268 942	331 472	351 805	349 156	350 930
Penerimaan SDA	168 825	213 823	225 844	203 730	198 088
Bagian Laba BUMN	30 097	28 184	30 798	36 456	37 000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	59 429	69 361	73 459	85 471	91 083
Pendapatan Badan Layanan Umum	10 591	20 104	21 704	23 499	24 759
Hibah	3 023	5 254	5 787	4 484	1 360
Jumlah	995 272	1 210 600	1 338 110	1 502 005	1 662 509

Catatan : Perbedaan satu digit di belakang angka penjumlahan karena pembulatan.

¹⁾ LKPP ²⁾ APBN-P ³⁾ RAPBN

Sumber : www.bps.go.id dari Departemen Keuangan, data diolah, diakses pada 25 November 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan Negara Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula pendapatan negara dari sektor perpajakan selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pendapatan negara. Kenyataan bahwa pendapatan dari sektor pajak selalu mendominasi total pendapatan negara dan seiring dengan menipisnya hasil penjualan sumber daya alam, membuat pemerintah sadar bahwa pajak memegang peran penting sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Oleh sebab itu, pemerintah dengan giat terus menggali potensi pendapatan negara dari sektor pajak karena pajak dinilai sebagai sumber pendapatan yang tidak ada habisnya, bahkan akan terus menerus bertambah sesuai dengan meningkatnya potensi penerimaan pajak negara.

Penerimaan pajak di Indonesia, terutama pajak penghasilan, dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh wajib pajak dan lembaga perpajakan seperti kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak, jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, dan sosialisasi perpajakan (Anti, 2014). Secara eksternal, penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara. Kondisi perekonomian negara yang stabil akan berpengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakatnya. Hal ini berdampak pada pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap penerimaan pajak penghasilan negara. Stabilitas ekonomi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak negara tidak lepas dari pengaruh variabel-variabel ekonomi makro yang ada dalam negara tersebut. Variabel-variabel ekonomi makro yang menjadi

pertimbangan dalam melihat kondisi perekonomian antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (Hidayat, 2006 dan Rismawati, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian suatu negara. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan jumlah produksi barang dan jasa yang meningkat (Rahardja dan Manurung, 2008: 129). Tujuan utama dari perhitungan dan penyajian pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat seberapa baik kondisi perekonomian negara, sekaligus masalah ekonomi yang sedang dialami oleh negara tersebut.

Rismawati (2013) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan pajak penghasilan. Dalam penelitian tersebut disebutkan pula nilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2001-2012 terus mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penerimaan pajak. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menaikkan pendapatan per kapita, dimana kenaikan pendapatan per kapita masyarakat akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara, khususnya pajak penghasilan. Selain pertumbuhan ekonomi, variabel lain yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian secara makro adalah inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara (Badan Pusat statistik, 2015). Inflasi menjadi masalah makro yang ditangani pemerintah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia cenderung berada di tingkatan sederhana. Artinya Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan inflasi yang tinggi, tetapi juga tidak mampu menekan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2010-2014 sebesar 5,63% (Bank Indonesia, 2015).

Kecakapan pemerintah mengendalikan inflasi dalam suatu perekonomian berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Inflasi yang terkendali akan menjaga harga-harga barang dan jasa tetap terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat cenderung terjaga. Namun ada kalanya sebuah negara berada dalam keadaan inflasi yang relatif tinggi. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara karena dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran (Sukirno, 2006: 25). Dalam keadaan inflasi, pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi, salah satunya adalah kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga.

Tingkat suku bunga (*BI rate*) yang berlaku digunakan oleh Bank Sentral sebagai upaya pengontrol peredaran uang di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi negara. *BI rate* adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk kebijakan moneter yang

diumumkan kepada publik. *BI rate* kemudian digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Tingkat suku bunga juga berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat (Sukirno, 2006: 25). Jika suku bunga rendah, maka jumlah uang beredar akan tinggi dan investasi akan bertambah, hal ini berakibat pada peningkatan pengeluaran (*output*) secara agregat sehingga kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran dapat ditekan. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar terlalu tinggi (inflasi) maka suku bunga dapat ditingkatkan untuk menurunkan investasi dan pengeluaran agregat sehingga uang yang beredar dapat dikendalikan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara, yang dapat mendorong penerimaan pajak menjadi optimal.

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia merupakan variabel ekonomi makro yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Negara dapat memperoleh penerimaan pajak yang optimal apabila perekonomian negara tersebut berada dalam kondisi yang stabil. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi ekonomi makro dan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran kondisi ekonomi makro dan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Mengetahui pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

D. Kontribusi Penelitian

Dilakukannya penelitian ini memberikan kontribusi terhadap:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperbarui informasi atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan kontribusi praktis kepada berbagai pihak, diantaranya adalah:

a. Instansi atau Pemerintah Terkait

Memberikan informasi dan masukan kepada lembaga pemerintah terkait mengenai hubungan pengaruh variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan pajak penghasilan.

b. Peneliti Selanjutnya

Menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, kontribusi yang diberikan atas penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan kajian-kajian lain berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, variabel, populasi dan sampel penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Bab ini berisi gambaran umum lokasi dilakukannya penelitian, perkembangan ekonomi makro dan penerimaan pajak penghasilan, analisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian seperti

analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan hipotesis serta penjelasan mengenai pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak penghasilan secara simultan dan parsial.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi tentang penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh:

1. Hidayat (2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Khomarul Hidayat tahun 2006 berjudul Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Dolar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Suku Bunga SBI (X_1), Fluktuasi Kurs Dolar AS (X_2), Tingkat Inflasi (X_3) dengan variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat suku bunga SBI menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Hubungan nilai kurs Dolar AS mempunyai tingkat hubungan yang lemah namun positif dan mempunyai hubungan yang signifikan sedangkan hubungan tingkat inflasi tergolong lemah namun positif dengan hubungan yang signifikan. Sedangkan uji bersama variabel X dan Y menunjukkan korelasi sedang dan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

2. Sinaga (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Andar Rohnal Sinaga tahun 2010 berjudul Pengaruh Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Yaitu Poduk Domestik Bruto (X_1), Tingkat Suku Bunga (X_2), Inflasi (X_3), Nilai Tukar Rupiah (X_4), Nilai Impor (X_5), Harga Minyak Mentah (X_6), dan *Dummy Variable* (X_7) dengan

variabel terikat Penerimaan Pajak (Y). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa total penerimaan pajak dipengaruhi oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, nilai impor dan inflasi. Sedangkan variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, impor dan tingkat suku bunga, variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan inflasi. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan harga minyak mentah dunia.

3. Rismawati (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Wenni Rismawati tahun 2013 dengan judul Pengaruh Variabel Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus: Tahun 2001-2012). Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa KPP (X_1), wajib pajak (X_2), pertumbuhan ekonomi (X_3), suku bunga (X_4) dan variabel terikat penerimaan pajak (Y). Hasil penelitian ini adalah rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan *time series* 2001-2012 dipengaruhi secara positif oleh variabel KPP, wajib pajak, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan.

4. Ferdiawan (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Andika Ferdiawan tahun 2015 berjudul Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikasi Bank

Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan variabel bebas tingkat inflasi (X_1), tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia (X_2), dan nilai kurs (X_3) dengan variabel terikat penerimaan pajak (Y). Penelitian ini memberikan hasil bahwa Tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia, dan nilai tukar kurs memiliki pengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

5. Pratama (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Nicola Putra Pratama tahun 2016 berjudul Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Inflasi (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2) dan Jumlah Wajib Pajak (X_3) dengan variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian secara simultan variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

6. Megayanti (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Nur Megayanti tahun 2010 berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga SBI, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa X_1 Produk Domestik Bruto (PDB), X_2 Suku Bunga SBI, X_3 Inflasi dan variabel

terikat Y Penerimaan Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel PDB yang berkorelasi positif dan signifikan dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan untuk variabel suku bunga SBI dan inflasi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khomarul Hidayat (2006)	Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Dolar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.	Variabel yang digunakan, yaitu variabel X berupa Suku Bunga SBI, dan Tingkat Inflasi. Variabel Y berupa Pajak Penghasilan.	Penambahan variabel X oleh peneliti yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Penggunaan <i>sample</i> berupa periode <i>time series</i> yang digunakan.
2	Andar Rohnal Sinaga (2010)	Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah (Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2003-2013).	Penggunaan variabel X berupa Produk Domestik Bruto, Inflasi.	Variabel X berupa Tingkat suku bunga SBI. Variabel Y berupa Penerimaan Pajak Penghasilan. Penggunaan <i>sample</i> berupa periode <i>time series</i> yang digunakan.
3	Wenni Rismawati (2013)	Pengaruh Variabel Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus: Tahun 2001-2012)	Variabel X berupa Pertumbuhan ekonomi, suku bunga. Variabel Y berupa Penerimaan Pajak	Peneliti tidak menggunakan variabel pajak sebagai variabel X dan penggunaan <i>sample</i> berupa periode <i>time series</i> yang digunakan.

4	Mohammad Andika Ferdiawan (2015)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikasi Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Penggunaan variabel X berupa tingkat inflasi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan variabel Y berupa Penerimaan pajak penghasilan	Penambahan variabel X berupa Pertumbuhan Ekonomi dan penggunaan <i>sample</i> berupa periode <i>time series</i> yang digunakan.
5	Nicola Putra Pratama (2016)	Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Penggunaan variabel X berupa inflasi dan variabel Y berupa penerimaan pajak penghasilan.	Penggunaan variabel X berupa pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak serta lokasi penelitian di KPP Pratama Malang Utara.
6	Ambar Nur Megayanti (2010)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga SBI, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak	Penggunaan variabel X berupa Produk Domestik Bruto, suku bunga SBI, dan inflasi serta variabel Y berupa penerimaan pajak	Penggunaan periode <i>time series</i> penelitian yang berbeda.

Sumber: *Olahan Peneliti, 2015*

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.” Sedangkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Halim, *et al* (2014: 1-2)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Definisi pajak menurut Seligman dalam Halim, *et al* (2014: 1-2)

Tax is compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the expenses incured in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.

- c. Definisi pajak menurut Feldmann dalam Halim, *et al* (2014: 1-2)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- d. Definisi pajak menurut Smeets dalam Halim, *et al* (2014: 1-2)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

- e. Definisi pajak menurut Adriani dalam Halim, *et al* (2014: 1-2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri khusus sebagaimana Rahayu dan Suhayati (2010: 1-2) menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Merupakan hal yang sangat mendasar bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan menurut undang-undang. Beban pajak dipikul oleh rakyat, dengan aturan tertuang dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.
- b. Pajak dapat dipaksakan
Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

Fungsi *budgetair* (anggaran) pajak adalah untuk mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Fungsi Pajak

Secara umum, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat umum seperti pembiayaan rutin pemerintah dan pelaksanaan pembangunan negara. Secara khusus, pajak memiliki setidaknya dua fungsi penting yaitu sebagai fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Rahayu dan Suhayati (2010: 3) menjelaskan fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang melakukan pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan yang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dari sektor swasta.

3. Jenis-jenis Pajak

Pajak dikategorikan menjadi beberapa kelompok menurut jenisnya. Resmi (2011: 7) mengelompokkan jenis pajak menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Jenis pajak menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak langsung

Merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak tidak langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Jenis pajak menurut sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak subjektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2) Pajak objektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- c. Jenis pajak menurut lembaga pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak negara (pajak pusat)

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

4. Asas Pemungutan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan asas-asas tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Smith dalam Waluyo (2013: 13) sebagai berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak ditentukan dengan peraturan yang jelas, yaitu undang-undang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu melakukan pembayaran.

c. *Convenience*

Waktu dilakukannya pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan kondisi wajib pajak sehingga tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan dibayar saat wajib pajak menerima penghasilan (*pay as you earn*).

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

5. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Resmi (2011: 5-6) memaparkan beberapa teori yang mendukung hak negara untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya sebagai berikut:

- a. Teori asuransi
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, harta dan juga bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut memerlukan pembayaran premi.
- b. Teori kepentingan
Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
- c. Teori gaya pikul
Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.
- d. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)
Teori ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap suatu negara dalam bentuk pembayaran pajak.
- e. Teori asas gaya beli
Teori ini menyamakan pemungutan pajak dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Beberapa peraturan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

2. Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap berupa:
 - 1) Tempat kedudukan manajemen
 - 2) Cabang perusahaan
 - 3) Kantor perwakilan
 - 4) Gedung kantor
 - 5) Pabrik
 - 6) Bengkel
 - 7) Gudang
 - 8) Ruang untuk promosi dan penjualan
 - 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam
 - 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
 - 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
 - 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 berikut:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikannya sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

4. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: *Undang-Undang Pajak Penghasilan (2009)*

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Alasan perubahan:

- 1) Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan
- 2) Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri.

Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%

Untuk UKM tarif yang diperlakukan sesuai dengan PP 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1% dikalikan dengan penghasilan bruto (Penghasilan sampai dengan Rp. 4,8 Miliar).

Sedangkan untuk perusahaan dengan penghasilan mulai dari Rp. 4,8 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar dikenakan tarif 25% dengan pemberian fasilitas sesuai dengan UU PPh Pasal 31 E.

D. Ekonomi Makro

1. Pengertian Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang fokus membahas perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat (besar-besaran). McConnell and Brue (2005: 9) menjelaskan bahwa ekonomi makro meneliti ekonomi secara keseluruhan baik agregat maupun subdivisi dasar ekonomi seperti sektor pemerintah, rumah tangga, dan sektor bisnis. Agregat adalah kumpulan unit-unit ekonomi tertentu yang diperlakukan seolah-olah menjadi satu unit kesatuan.

Dalam konteks agregat, ekonomi makro berusaha untuk menjelaskan gambaran atau garis besar umum, struktur ekonomi, dan hubungannya secara keseluruhan. Ekonomi makro membahas berbagai masalah utama perekonomian yang selalu dihadapi oleh suatu negara seperti masalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, kenaikan harga-harga (inflasi), neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah tersebut, dibentuk kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sukirno (2006: 22) menyebutkan kebijakan-kebijakan ekonomi makro tersebut bertujuan untuk:

- a. Menytabilkan kegiatan ekonomi
Kestabilan ekonomi diartikan sebagai keadaan ekonomi di mana tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi dan tidak terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga stabil dan tidak menunjukkan perubahan yang berarti, dan kestabilan neraca pembayaran dengan tercapainya keseimbangan antara ekspor impor dan lalu lintas modal dari/ke luar negeri.
- b. Mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi
Apabila suatu perekonomian dapat selalu mencapai kesempatan kerja penuh, dengan sendirinya ekonomi menjadi stabil dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Namun faktanya, negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kebijakan pemerintah biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja penuh.
- c. Menghindari masalah inflasi
Inflasi yang tinggi menimbulkan akibat buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Inflasi terjadi baik karena ketidakstabilan politik dan ekonomi negara, permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan, maupun kenaikan biaya produksi. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro perlu dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh inflasi tersebut.
- d. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh
Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan ekonomi makro dalam jangka panjang, dan menjadi tujuan utama perekonomian semua negara. Negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang dengan alasan untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat.

- e. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing
Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana keluar negeri yang lebih besar dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat dengan daya beli riil masyarakat merosot. Apabila keadaan ini terjadi, maka kegiatan ekonomi di dalam negeri menurun dan pengangguran akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kebijakan-kebijakan ekonomi agar kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing tetap teguh keadaannya.

Pemerintah dapat menjalankan beberapa kebijakan ekonomi dalam upaya mencapai tujuan yang telah dikemukakan di atas. Kebijakan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi masalah pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah, langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Selanjutnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam keadaan inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.

b. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia bank Sentral adalah Bank Indonesia) untuk memengaruhi penawaran yang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan sebaliknya suku bunga yang rendah akan menambah penanaman modal. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan memengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menambah penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter.

Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Pemerintah melalui Bank Sentral dapat menambah penawaran uang dengan alat-alat dalam kebijakan moneter. *Ceteris paribus*,

pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Hal ini berdampak kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran akan menurun.

Dalam keadaan inflasi maka langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi (Sukirno, 2006).

2. Variabel Ekonomi Makro

Ekonomi makro berbicara mengenai sebuah perekonomian dan faktor-faktor secara agregat, sehingga variabel yang dibahas dalam ekonomi makro merupakan variabel agregat. Variabel agregat berkaitan dengan isu-isu yang timbul dalam perekonomian makro seperti masalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi, jumlah uang beredar dan inflasi, pengangguran, neraca perdagangan dan pembayaran, serta produktivitas (Putong, 2013: 275).

Menurut teori Keynes, faktor utama yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat, yaitu konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dalam teori tersebut terdapat empat komponen utama pengeluaran agregat yakni konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor (Sukirno, 2006: 8).

Mankiw (2006) menjelaskan indikator umum ekonomi makro terdiri dari aspek moneter dan fiskal. Aspek moneter meliputi penawaran uang, termasuk di

dalamnya jumlah uang beredar, suku bunga, serta inflasi. Aspek fiskal meliputi pengeluaran agregat dan pajak, termasuk dalam pengeluaran agregat adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

E. Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Ahli-ahli ekonomi klasik memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Teori ekonomi klasik juga menitikberatkan pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006).

Menurut teori ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dianalogikan dengan apabila jumlah penduduk yang sedikit dan kekayaan alam berlimpah, maka pengembalian modal dari hasil kekayaan alam tersebut tinggi yang berimbas pada keuntungan para pengusaha. Pengusaha yang keuntungannya tinggi akan cenderung berinvestasi lebih banyak. Investasi yang besar akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi akan menurun apabila jumlah penduduk terlalu banyak. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang terlalu banyak menurunkan produktifitas setiap penduduk, yang berakibat pada turunnya kemakmuran masyarakat. Dalam keadaan seperti ini pendapatan yang

diperoleh pekerja hanya mencapai taraf cukup hidup saja. Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkembang (*stationary state*).

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2006) menyebutkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Pengusaha sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi disaat keadaan perekonomian sedang tidak berkembang. Pada saat ini pengusaha sadar bahwa mereka dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi yang menguntungkan. Demi memperoleh keuntungan tersebut pengusaha akan melakukan peminjaman modal dan melakukan penanaman modal baru (investasi) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dengan menaikkan pendapatan masyarakat. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengusaha semakin sulit untuk mencari peluang-peluang baru dalam upayanya berinovasi. Hal ini akan berakibat pada melambannya pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan keadaan ekonomi tidak lagi berkembang (*stationary state*).

c. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa:

- 1) Dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya dapat dicapai bila $I+G+(X-M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan (Sukirno, 2006).

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik memusatkan fokusnya pada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Rahardja dan Manurung (2008: 140) menyebutkan asumsi-asumsi penting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikemukakan oleh Solow (1956) antara lain adalah:

- 1) Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi)
- 2) Tingkat depresiasi dianggap konstan
- 3) Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal
- 4) Tidak ada sektor pemerintah
- 5) Tingkat pertambahan penduduk (tenaga kerja) juga dianggap konstan
- 6) Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penentu pertumbuhan adalah stok barang modal dan tenaga kerja, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita ditentukan oleh stok barang modal per tenaga kerja.

2. Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor, seperti yang dijelaskan oleh Rahardja dan Manurung (2008: 136) sebagai berikut:

- a. **Barang modal**
Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Salah satu upaya penambahan stok barang modal adalah melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi dimungkinkan terjadi apabila investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab jika investasi sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya atau tidak mengalami pertumbuhan.
- b. **Tenaga kerja**
Tenaga kerja masih menjadi faktor produksi yang dominan di negara berkembang. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan *output*.
- c. **Teknologi**
Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan negara dikhawatirkan akan memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, terutama negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.
- d. **Uang**
Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar *output* yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.
- e. **Manajemen**
Manajemen adalah peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi yang tinggi.
- f. **Kewirausahaan**
Para pengusaha mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan mengombinasikan input tersebut dapat disebut dengan kemampuan inovasi, yang akan menjadi motor pertumbuhan dan modernisasi perekonomian negara.
- g. **Informasi**
Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang (*perfect and simeric information*). Sebab makin banyak, makin benar, dan makin seimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan

dengan lebih cepat dan lebih baik. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sesungguhnya dapat digunakan sebagai indikasi dalam melihat dua hal. Hal pertama adalah pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, apakah berkembang menuju kemakmuran yang lebih tinggi atau justru mengalami penurunan perkembangan. Hal kedua yang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi adalah gambaran masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh suatu negara dalam jangka panjang.

Indikator utama yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan adalah dengan mengetahui Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Rahardja dan Manulung (2008: 22) memberikan pengertian Produk Domestik Bruto sebagai alat untuk menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memerhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut *ouput*-nya diperhitungkan dalam PDB.

Menurut Djohanputro (2006) terdapat tiga cara menghitung PDB, yaitu:

a. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran didasari oleh prinsip bahwa seluruh barang yang dihasilkan oleh suatu negara dibeli semuanya oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat empat pihak pembeli, yaitu konsumen akhir, pemerintah, pihak swasta, dan pembeli luar negeri (ekspor).

PDB pendekatan pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

$$PDB = C + G + I + (X - M)$$

Keterangan:

C = konsumsi masyarakat

G = pengeluaran pemerintah

I = investasi

X = ekspor

M = impor

Dalam rumus tersebut, nilai impor mengurangi data pengeluaran karena sebagian produk yang dikonsumsi masyarakat berasal dari luar negeri (impor), dan impor bukan termasuk produk yang berasal dari dalam negeri.

b. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan pendekatan pendapatan, PDB dihitung dari penggabungan seluruh pendapatan yang ada dalam negeri. Perhitungan PDB dengan pendekatan pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$PDB = R + W + I + P$$

Keterangan:

R = sewa

W = upah

I = bunga modal

P = laba perusahaan

Pendapatan yang dimaksud dikelompokkan menjadi:

- 1) Kompensasi karyawan
- 2) Pendapatan properti
- 3) Pendapatan sewa
- 4) Pendapatan bunga
- 5) Laba perusahaan
- 6) Depresiasi
- 7) Pajak produksi
- 8) Kesalahan statistik.

c. Pendekatan *Output* (Produksi)

Melalui pendekatan *output* atau pendekatan produksi, PDB dihitung berdasarkan seluruh hasil produksi, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh produsen. Rumus PDB pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$PDB = (PXQ)_1 + (PXQ)_2 + \dots (PXQ)_n$$

Keterangan:

P = harga

Q = kuantitas

Badan Pusat Statistik mengelompokkan produsen sebagai berikut:

- 1) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, gas, dan air bersih
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, hotel, dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan dan real estate
- 9) Jasa-jasa.

F. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan sebuah keadaan dimana terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian suatu negara yang disertai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus. Rahardja dan Manurung (2008: 165) mendefinisikan tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

- a. Kenaikan harga
Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan harga dapat diukur dengan periode waktu misalnya perminggu, perbulan, pertriwulan, atau pertahun.
- b. Bersifat umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.
- c. Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

2. Jenis-jenis Inflasi

Selanjutnya berdasarkan tingkat kelajuan harga-harga yang berlaku, Sukirno (2006: 337) menggolongkan inflasi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Inflasi merayap
Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Inflasi ini terjadi dengan kenaikan tingkat harga yang tidak melebihi dua atau tiga persen setiap tahunnya.
- b. Inflasi sederhana (*moderate*)
Inflasi sederhana terjadi dengan tingkat kenaikan harga rata-rata lima hingga sepuluh persen setahun. Hal ini terjadi saat suatu negara tidak mengalami hiperinflasi tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah.
- c. Hiperinflasi
Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat.

Menurut Putong (2013: 423), inflasi dikategorikan menjadi 4 menurut sifatnya, yaitu:

- a. Inflasi merayap/ rendah (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun.
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar.
- c. Inflasi berat (*high inflation*) yaitu inflasi yang besarnya antara 10-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum mengalami kenaikan bahkan berubah sama sekali.
- d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*) yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis di atas 100%. Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih memilih menukarkan uangnya dengan barang.

3. Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi menjadi salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena inflasi berhubungan erat

dengan keadaan ekonomi masyarakat di negaranya. Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, Sukirno (2006: 333) membedakan inflasi sebagai berikut:

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

Disamping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi desakan biaya berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

4. Dampak Terjadinya Inflasi

Meningkatnya harga-harga barang yang tinggi dan berlangsung secara terus-menerus akan menimbulkan dampak buruk, tidak hanya bagi stabilitas ekonomi negara tetapi juga bagi kemakmuran rakyatnya.

Inflasi yang tinggi (hiperinflasi) berdampak buruk pada perkembangan ekonomi negara. “Inflasi mengganggu perkembangan ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi” (Rahardja dan Manurung, 2008: 178). Para konsumen akan berekspektasi bahwa harga-harga barang akan terus-menerus naik sehingga mendorong mereka untuk melakukan permintaan yang melebihi biasanya dengan alasan penghematan di masa depan. Sedangkan bagi produsen, karena permintaan semakin meningkat, berekspektasi memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila mereka menunda melakukan penjualan, hal ini mengakibatkan penawaran barang menurun sedangkan permintaan dari konsumen terus meningkat. Keadaan seperti ini menjadikan kondisi ekonomi semakin memburuk dan tidak stabil.

Selain berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi, inflasi juga menimbulkan efek buruk kepada individu dan masyarakat. Sukirno (2006: 339) menyebutkan setidaknya efek buruk inflasi terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap.
- b. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan ekuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.
- c. Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpenghasilan tetap akan semakin tidak merata.

G. Tingkat Suku Bunga

1. Pengertian Tingkat Suku Bunga

“Bunga (*interest rate*) adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak satu atas penggunaan dana milik pihak lain selama periode tertentu. Atau, harga yang diterima oleh *lender* karena menyewakan dana kepada *borrower*” (Joesoef, 2008: 41).

Dengan kata lain, Darmawi (2006: 181) menggambarkan tingkat bunga sebagai harga dari kredit, namun harga itu tidak sama dengan harga barang di pasar komoditi, karena tingkat bunga sesungguhnya merupakan suatu angka perbandingan, yaitu jumlah biaya pinjaman dibagi dengan jumlah uang yang sesungguhnya dipinjam, biasanya dinyatakan dalam persentase setiap tahun.

Tingkat bunga berkaitan dengan peminjam, pemberi pinjaman, penabung, dan investor. Apabila tingkat bunga mengalami kenaikan, maka akan menarik keinginan untuk memperbesar tabungan dan mendorong kegiatan pinjaman dana. Namun apabila tingkat bunga mengalami penurunan, maka akan menurunkan keinginan untuk menabung dan mengurangi kegiatan pemberian pinjaman. Tingkat bunga yang tinggi juga berpengaruh terhadap agresivitas penanaman modal (investasi) dan tingkat bunga yang rendah cenderung berdampak pada kelesuan investasi.

Tinggi atau rendahnya tingkat bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Darmawi (2006: 182) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga yaitu:

- a. Harapan akan inflasi
- b. Jatuh tempo sekuritas atau kredit

- c. Keberadaan risiko pada peminjaman
- d. Risiko tentang penarikan sekuritas sebelum jatuh tempo
- e. Pajak
- f. *Security convertibility*.

2. Peranan Tingkat Suku Bunga dalam Perekonomian

Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian. Tingkat bunga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari karena berpengaruh terhadap keputusan untuk menabung, memberikan pinjaman, dan menanam modal.

Darmawi (2006: 181) menjelaskan peranan tingkat suku bunga dalam perekonomian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin tabungan akan mengalir kedalam investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Menjatahkan penawaran kredit kepada proyek investasi dengan harapan penghasilan paling tinggi.
- c. Membawa penawaran uang kedalam keseimbangan dengan kebutuhan uang masyarakat.
- d. Merupakan alat kebijaksanaan pemerintah yang penting untuk memengaruhi volume tabungan dan investasi. Jika pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan pengangguran meningkat, pemerintah biasa menggunakan kebijakan moneter untuk menurunkan tingkat bunga, serta merangsang peminjaman investasi.

3. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah salah satu instrumen atau surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang di Indonesia. SBI pada prinsipnya merupakan surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh BnK Indonesia (sebagai Bank sentral) dengan sistem diskonto, sebagai surat hutang jangka pendek. Tujuan penerbitan SBI adalah sebagai sarana pengendalian

moneter melalui pasar terbuka, dengan harapan menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah.

SBI diperdagangkan dengan mekanisme perantara (*security house*) dengan penunjukkan beberapa *market* dan *broker* yang terdiri dari bank-bank umum sebagai penunjang perdagangan SBI. Darmawi (2006: 93) menjelaskan bahwa *market maker* bertindak sebagai penggerak pasar sekunder, yang berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membuat dan mengumumkan *qutation*.
- b. Secara aktif mengajukan penawaran dan permintaan SBI di pasar sekunder.
- c. Membeli dan menjual SBI dari dan kepada pihak yang mencari dan menawarkan SBI di pasar sekunder.

4. Tingkat Suku Bunga Serifikat Bank Indonesia

Tingkat suku bunga yang berlaku digunakan oleh Bank Sentral sebagai upaya pengontrol peredaran uang di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi negara. Tingkat suku bunga SBI ditentukan oleh Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral) dengan mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Menurut Ferdiawan (2015) sejak tahun 2005 Bank Indonesia mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan Bank Indonesia untuk pelelangan pada masa periode tertentu yang dikenal dengan *BI rate*. *BI rate* adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk kebijakan moneter yang diumumkan kepada publik. *BI rate* kemudian digunakan sebagai acuan para

pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

H. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tujuan utama dari penghitungan pertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian makin membaik. Salah satu indikasi perekonomian mengalami pertumbuhan adalah bertambahnya kualitas dan kuantitas faktor-faktor produksi yang ada di dalamnya (Sukirno, 2006: 23). Pertambahan penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja yang tersedia, yang selanjutnya dioptimalkan kualitasnya dengan pendidikan, pengalaman, dan ketrampilan yang diperoleh. Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern. Berbagai perkembangan ini akan menambah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka stabilitas ekonomi negara tersebut akan tercapai. Pemungutan pajak dapat optimal jika perekonomian negara dalam keadaan stabil.

Megayanti (2010) dalam penelitiannya menghubungkan Produk Domestik Bruto dengan produktivitas barang dan jasa yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Lebih lanjut Rismawati (2013) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan pajak penghasilan. Dalam penelitian tersebut disebutkan pula nilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2001-2012 terus mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penerimaan pajak. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menaikkan pendapatan per kapita, dimana kenaikan pendapatan per kapita masyarakat akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara, khususnya pajak penghasilan.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kecakapan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Jumlah uang beredar yang terkendali akan menjaga harga-harga barang dan jasa tetap terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat cenderung tinggi. Inflasi pada tingkatan tertentu berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas perekonomian negara (Sukirno, 2006: 14). Dalam kondisi perekonomian yang stabil, pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Pratama (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa inflasi yang tak terkendali menyebabkan penerimaan negara di sektor pajak mengalami penurunan. Berbeda dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2006) dan Ferdiawan (2015) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi akan berakibat pada

kenaikan penerimaan pajak penghasilan. Begitu pula sebaliknya penurunan inflasi juga akan mengakibatkan penurunan jumlah pajak penghasilan yang diterima oleh negara. Hal ini terjadi dengan anggapan pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tetap (konstan).

3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Fisher dan Mishkin (2006: 414) memberikan uraian bahwa perubahan pada suku bunga riil berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Naik turunnya tingkat suku bunga dan pengaruhnya terhadap konsumsi dipengaruhi oleh dua efek, yakni efek pendapatan dan efek substitusi. Efek pendapatan berupa perubahan konsumsi yang terjadi karena ketika pendapatan naik dan suku bunga naik maka konsumen lebih memilih untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Konsumen akan memperbesar konsumsi ketika konsumsi tersebut ditujukan untuk barang-barang normal. Efek substitusi menggambarkan bahwa perubahan konsumsi terjadi akibat perbedaan harga relatif di berbagai periode. Ketika barang di periode sekarang relatif tinggi disebabkan oleh tingginya tingkat suku bunga, maka konsumen akan cenderung mengurangi konsumsi dan memperbesar tabungan. Hal ini dilakukan dengan harapan konsumen dapat melakukan konsumsi yang lebih di periode mendatang. Efek substitusi mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan konsumsi di masa sekarang atau masa mendatang. Konsumsi, yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, merupakan

salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto yakni $Y = C + I + G + (X - M)$.

Tingkat suku bunga juga berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat (Sukirno, 2006: 25). Jika suku bunga rendah, maka jumlah uang beredar akan tinggi dan investasi akan bertambah, hal ini berakibat pada peningkatan pengeluaran (*output*) secara agregat sehingga kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran dapat ditekan. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar terlalu tinggi (inflasi) maka suku bunga dapat ditingkatkan untuk menurunkan investasi dan pengeluaran agregat sehingga uang yang beredar dapat dikendalikan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara, yang dapat mendorong penerimaan pajak agar optimal.

Hidayat (2006) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mempunyai pengaruh yang rendah dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hampir sama dengan itu, Ferdiawan (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun maka penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan.

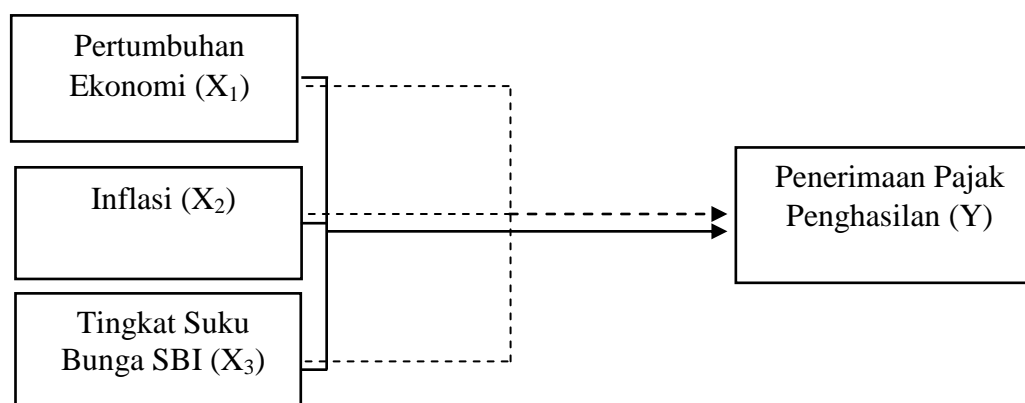
I. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini tercermin dalam gambar berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual
Sumber: *Olahan Peneliti (2015)*

Peneliti menguraikan kerangka konseptual tersebut menjadi lebih spesifik sehingga diperoleh model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 2: Model Hipotesis
Sumber: *Olahan Peneliti (2015)*

Keterangan:

—→ = Simultan

- - → = Parsial

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono, 2008:64).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Diduga pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

H_2 = Diduga pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Idrus (2007: 42) tujuan penelitian kuantitatif diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi dan generalisasi. Penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk melihat fenomena yang ada dan kemudian dibandingkan dengan teori yang dimiliki. Artinya penelitian kuantitatif akan mencandra fenomena berdasar pada teori yang dimilikinya.

Metode *explanatory* diorientasikan untuk melihat dan menjelaskan hubungan kausal berupa hubungan sebab akibat dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2009: 56). Penelitian ini merupakan penelitian replikatif atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan variabel dan pengambilan sampel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data di website resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) Data yang dibutuhkan untuk diambil adalah data yang mengandung variabel makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia serta penerimaan pajak penghasilan.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan sebuah informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* selama periode 2010 hingga 2014 (5 tahun).

Data sekunder tersebut dapat diperoleh di web-web resmi instansi yang berkaitan. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan penerimaan pajak penghasilan diperoleh dari web resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) sedangkan data tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia diperoleh dari web resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id).

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel makroekonomi yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3).
2. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan (Y).

Variabel-variabel tersebut memiliki definisi operasional sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

a. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran periode tahun 2010 hingga 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

b. Inflasi (X_2)

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga secara umum mengalami peningkatan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini menggunakan data inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik periode tahun 2010 hingga 2014.

c. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3)

Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia atau dikenal dengan *BI rate* adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk kebijakan moneter yang diumumkan kepada publik. *BI rate* kemudian digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan *BI rate* pada periode tahun 2010 hingga 2014.

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Penerimaan pajak penghasilan (Y)

Penerimaan pajak penghasilan merupakan jumlah penerimaan pajak penghasilan oleh negara yang didapat dari penghasilan kena pajak wajib pajak dikalikan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Data

penerimaan pajak penghasilan yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik periode tahun 2010 hingga 2014.

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Ekonomi Makro	Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB)	Rata-rata Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014 Sumber: www.bps.go.id
	Inflasi (X_2)	Tingkat peredaran uang dan harga-harga per tahun	Tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014 Sumber: www.bps.go.id
	Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3)	Suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik sebagai bentuk kebijakan moneter pemerintah	Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014 Sumber: www.bi.go.id
Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Jumlah seluruh objek pajak penghasilan yang diterima oleh negara secara nasional	Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014 Sumber: www.bps.go.id

Sumber: *Olahan Peneliti (2015)*

E. Populasi dan Sampel

Menurut Sarjono dan Julianita (2011: 21) populasi merupakan seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian, dimana karakteristik tersebut

berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan populasi berupa data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014.

“Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan” (Sarjono dan Julianita, 2011: 21). Karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series*, maka sampel dalam penelitian merupakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana setiap anggota populasi menjadi sampel (Sarjono dan Julianita, 2011: 29) sehingga sampel jenuh sama dengan populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara peneliti memperoleh sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Data didapat dan dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penelitian ini mengumpulkan data mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku

bunga Sertifikat Bank Indonesia dan penerimaan pajak penghasilan yang diperlukan dari website Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

2. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung data yang telah diperoleh dari dokumentasi, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku refesensi, surat kabar, majalah, undang-undang, jurnal ilmiah dan sebagainya. Informasi tersebut selanjutnya digunakan peneliti sebagai pendukung atas data yang diperoleh dari dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut” (Idrus, 2007: 113). Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode *time series* dari website resmi dari instansi-instansi yang berkaitan yaitu www.bi.go.id dan www.bps.go.id.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan seluruh data yang ada dalam populasi tanpa mengambilnya sebagian sebagai sampel. Data populasi tersebut umumnya masih mentah dan belum tertata dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan uji statistik deskriptif dengan tujuan menyajikan data yang telah diperoleh secara lebih matang dan tertata dengan baik. Statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami (Siregar, 2014: 2).

Sugiyono (2009: 207) menjelaskan lebih lanjut bahwa hasil dari uji statistik deskriptif adalah menyajikan data yang diperoleh melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua nilai rata-rata (populasi/sampel) atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa, dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga, tidak ada kesalahan generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur ada tidaknya pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Macam-macam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui suatu penyebaran data dapat dikatakan normal atau tidak. Sarjono dan Julianita (2011: 64) uji normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data karena data yang

berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya *parametric-test* (analisis yang menggunakan parameter seperti mean, standar deviasi, variasi, dan data harus berdistribusi normal). Data yang normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula sehingga data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Uji normalitas dilakukan dengan aplikasi SPSS dan mengolahnya hingga tahap terakhir berupa tabel dan angka.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011: 66), heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadinya homoskedastisitas dalam model atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas yaitu uji *scatterplot*, uji *gletjer*, uji *park*, dan uji *white*. Penelitian ini akan menggunakan uji *scatterplot* dalam mencari heteroskedastisitas variabelnya dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Tingkat heteroskedastisitas data diukur dari kejelasan pola dan penyebaran titik pada grafik *scatterplot*, dengan dasar analisis sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

c. Uji Multikolonieritas

“Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikolonieritas (gejala multikolonieritas) atau tidak” (Sarjono dan Juanita, 2011: 70). Multikolonieritas didefinisikan sebagai hubungan korelasi (sebab akibat) yang saling mempengaruhi antar variabel bebas. Sehingga penelitian yang menggunakan variabel bebas lebih dari satu membutuhkan adanya uji multikolonieritas. Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat VIF dan menggunakan aplikasi SPSS.

Menurut Ghozali (2011: 105), terdapat beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Menganalisis korelasi di antara variabel bebas. Jika di antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0.90), hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel bebas.
- 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* lebih kecil atau sama dengan 0.10 dan nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10.

d. Uji Autokorelasi

Wijaya dalam Sarjono dan Juanita (2011: 80) menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term* –ed.) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan problem korelasi.

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu uji *Durbin-Watson*, uji *Language Multiplier (LM)*, uji statistik Q , dan uji *Run Test*. Penelitian ini akan menguji autokorelasi dengan melakukan uji *Durbin-Watson* dengan penggunaan aplikasi SPSS. Pengambilan keputusan atas uji autokorelasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, baik positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber: *Olahan Peneliti (2015)*

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Idrus (2007: 230) menjelaskan bahwa apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, maka formula

statistika yang sesuai adalah analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat
 a = Konstanta
 $b_1...b_3$ = Koefisien regresi $X_1...X_3$
 X = Variabel bebas

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan peneliti dengan tujuan mencari kebenaran atas hipotesis yang telah dibuat. Uji hipotesis dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2011: 98) uji F dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau $H_0 : B_1 = B_2 = 0$. Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Hipotesis alternatif (H_a) yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model tidak sama dengan nol, atau $H_a : B_1 \neq B_2 \neq 0$. Artinya, semua

variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3) Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan statistik F adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain H_a diterima, yang menyatakan semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara terpisah mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Menurut Ghazali (2011: 99) uji t dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau $H_0 : b_i = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Hipotesis alternatif (H_a) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) tidak sama dengan nol, atau $H_0 : b_i \neq 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3) Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan statistik t adalah sebagai berikut:

- a) Jika jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 dapat ditolak jika nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, H_a diterima bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2011: 97) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Lebih lanjut, Ghazali menjelaskan kriteria penilaian R^2 adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
- 2) Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen variabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) merupakan Bank Sentral yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, status dan kedudukan serta tugas dan wewenangnya Bank Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. Undang-undang ini juga memberikan otonomi penuh kepada Bank Indonesia dalam mengatur bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai sebuah badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata, diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah dapat tercapai

dalam dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam perkembangan laju inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Bank Indonesia memiliki visi, misi, dan nilai-nilai strategis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu:

1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

2. Misi Bank Indonesia

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan sumber daya manusia Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang.

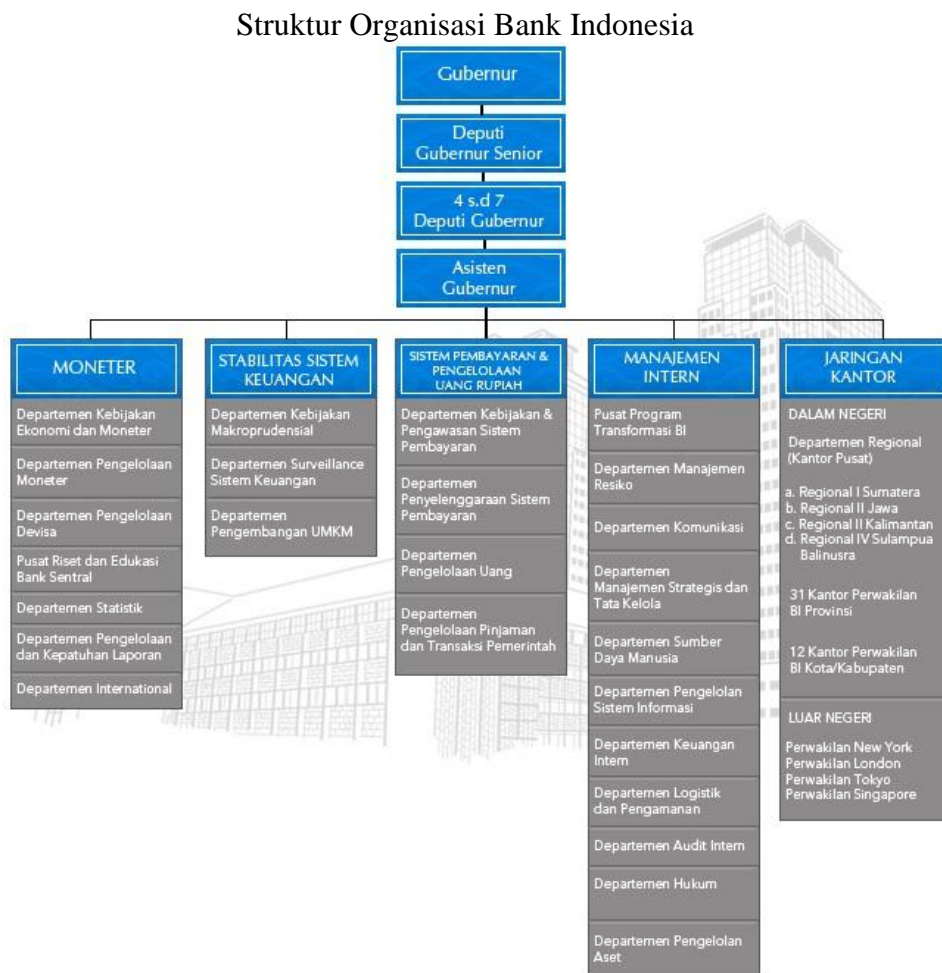
3. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia

Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan beberapa sasaran strategis untuk jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut:

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran.
2. Menjaga stabilitas nilai tukar.
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien.
4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan *surveillance* SP.
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis.
6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar.
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel.
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan *governance*.
9. Memperkuat ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI.
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Struktur organisasi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Sumber: *Bank Indonesia* (www.bi.go.id), data diolah *Peneliti* (2016)

Pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan ini dilakukan atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. (Sumber: Bank Indonesia dalam www.bi.go.id diakses pada 1 Maret 2016).

2. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dulunya bernama Biro Pusat Statistik. Biro ini kemudian berganti nama menjadi Badan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang statistik. Berdasarkan undang-undang tersebut, Badan Pusat statistik memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan isntitusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik memiliki visi, misi, dan nilai-nilai inti dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Visi Badan Pusat Statistik

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

2. Misi Badan Pusat Statistik

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

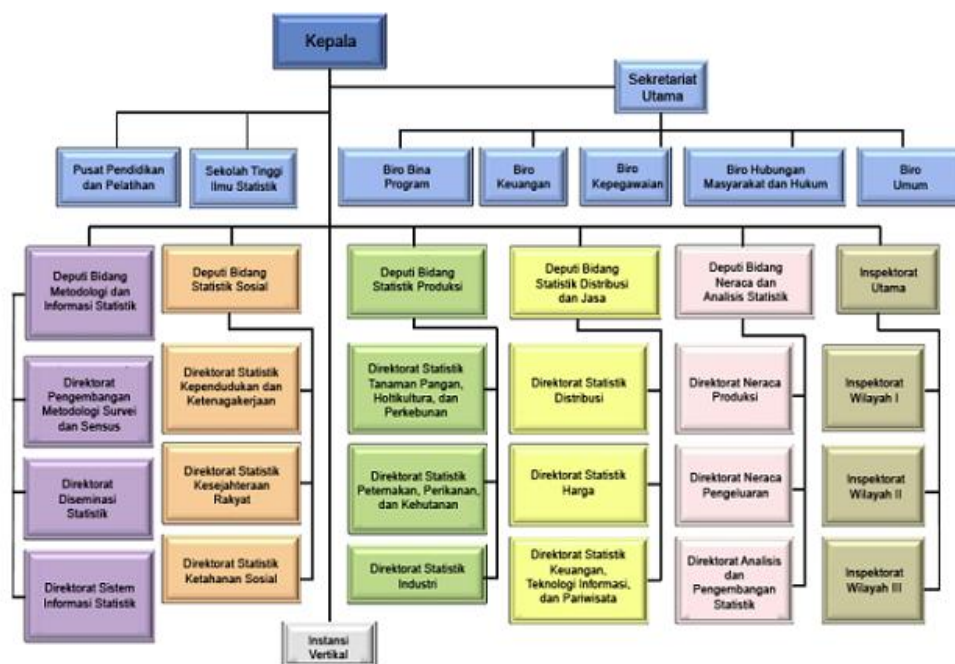
3. Nilai-nilai inti Badan Pusat Statistik

Nilai-nilai inti (*core values*) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai inti BPS terdiri dari:

- a. Profesional: kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik.
- b. Integritas: dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka, dan akuntanbel.
- c. Amanah: terpercaya, jujur, tulus, dan adil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Struktur organisasi BPS terdiri dari:

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik



Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), data diolah Peneliti (2016)

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPS adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik.
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.

3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.
4. Penetapan sistem statistik nasional.
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Kewenangan BPS adalah sebagai berikut:

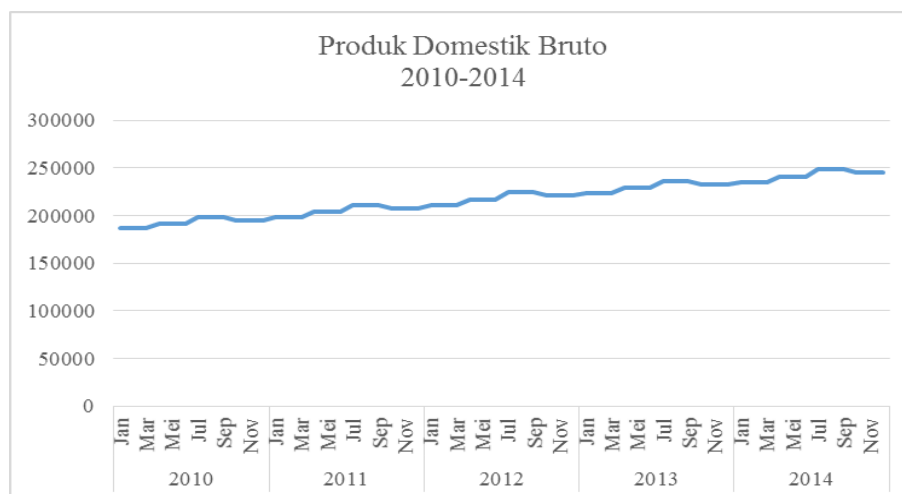
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (i) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang statistik; (ii) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. (Sumber: Badan Pusat Statistik dalam www.bps.go.id diakses pada 1 Maret 2016).

B. Statistik Deskriptif Data Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa baik aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam suatu

perekonomian negara. Indikator utama yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan adalah dengan mengetahui Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, karena tujuan utama penyajian PDB adalah untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang selama periode waktu tertentu. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007: 19). Berikut Produk Domestik Bruto Indonesia menurut pengeluaran sepanjang tahun 2010 hingga 2014:



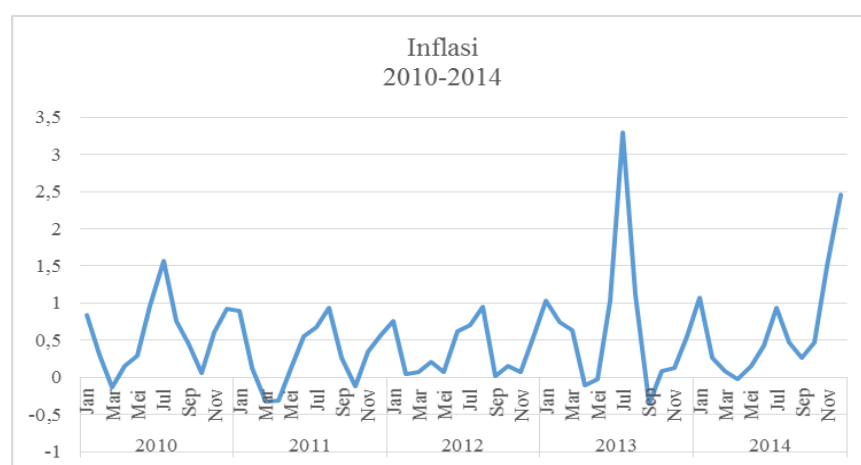
Gambar 5. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran 2010-2014
Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), data diolah Peneliti (2016)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi secara fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak selalu menunjukkan kenaikan, namun ada kalanya menunjukkan penurunan. Seperti pada bulan Juni 2010, PDB mengalami kenaikan dari Rp. 191.570,9 milyar ke Rp. 198.083,5 milyar di bulan Juli pada tahun yang sama. Namun hal ini tidak bertahan lama, seperti ditunjukkan bahwa PDB mengalami penurunan walaupun tidak signifikan dari bulan September sebesar Rp. 198.083,5 milyar menjadi Rp.

195.270,7 milyar di bulan Oktober pada tahun yang sama. Pada periode-periode selanjutnya, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDB selalu berfluktuatif, mengalami peningkatan dan penurunan hingga akhir tahun 2014.

2. Inflasi (X_2)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat seberapa baik kebijakan moneter suatu negara adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian suatu negara yang disertai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus. Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan harga-harga barang meningkat secara besar-besaran. Namun inflasi tidak selalu menjadi pertanda buruk dalam perekonomian, sejauh tingkat inflasi dapat dijaga agar tetap rendah. Tingkat inflasi (perubahan presentase dalam seluruh tingkat harga) sangat bervariasi sepanjang waktu dan antarnegara (Mankiw, 2007: 75). Berikut ini inflasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2014:



Gambar 6. Inflasi Tahun 2010-2014

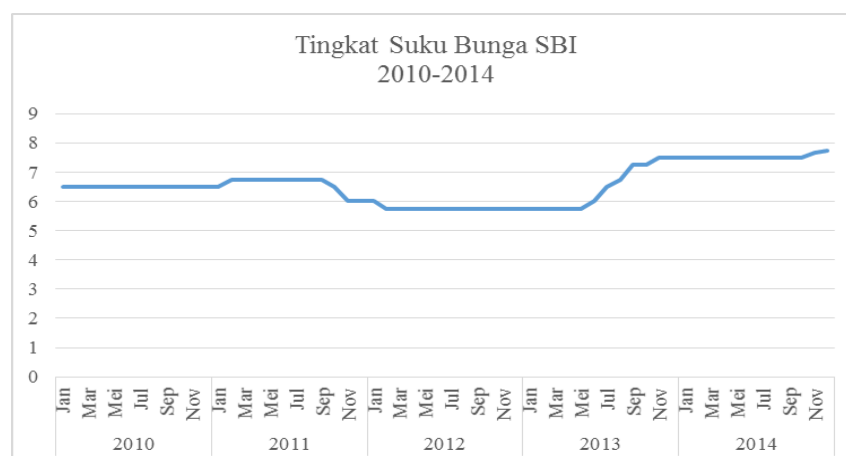
Sumber: Bank Indonesia (www.bps.go.id), data diolah Peneliti (2016)

Gambar di atas menunjukkan besarnya inflasi yang terjadi di Indonesia. Secara umum, Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014 mengalami inflasi pada tingkat ringan (di bawah 10% per tahun). Inflasi tertinggi terjadi pada periode Juli 2013 sebesar 3,29%, sedangkan inflasi terendah dicapai pada bulan September 2013 sebesar -0,35%. Selain pada dua periode tersebut inflasi di Indonesia terjadi secara fluktuatif, artinya inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dalam periode tertentu dan mengalami penurunan dalam periode tertentu pula selama tahun 2010 hingga 2014.

3. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3)

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia adalah tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagai bentuk kebijakan moneter yang kemudian digunakan oleh pelaku pasar sebagai acuan dalam melakukan jual beli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia.

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selama periode tahun 2010 hingga 2014 adalah sebagai berikut:



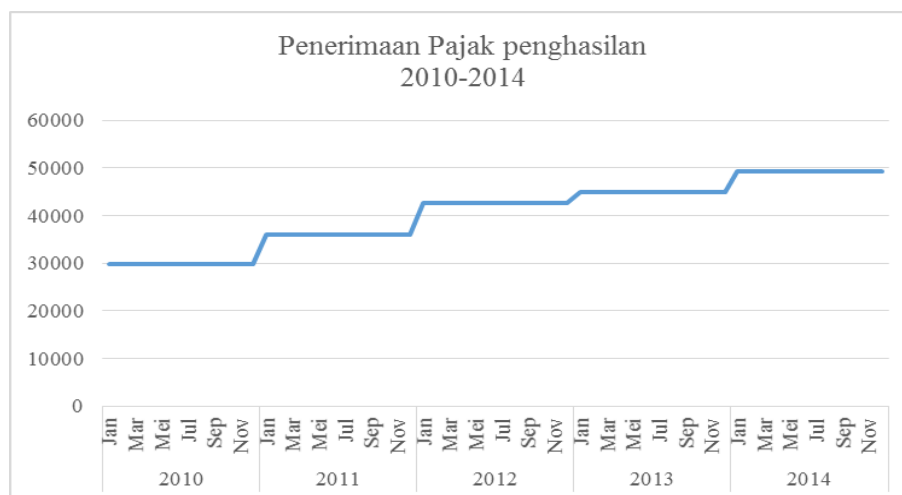
Gambar 7. Tingkat Suku Bunga SBI 2010-2014

Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id), data diolah Peneliti (2016)

Tingkat suku Bunga sertifikat Bank Indonesia sebagaimana terlihat dalam gambar di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 hingga 2014 mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Tingkat suku bunga terendah terjadi selama bulan Februari 2012 hingga Mei 2013 dengan tingkat bunga 5,75%. Sementara itu, tingkat suku bunga tertinggi terjadi selama periode akhir tahun 2014 yaitu pada bulan November sebesar 7,65% dan Desember sebesar 7,75%.

4. Penerimaan Pajak Penghasilan (X₄)

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan total seluruh pajak penghasilan yang diterima oleh negara meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, PPh Migas, dan PPh Lainnya (Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id, diakses 4 Maret 2016). Penerimaan PPh periode tahun 2010 hingga 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Penerimaan Pajak Penghasilan 2010-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), data diolah Peneliti (2016)

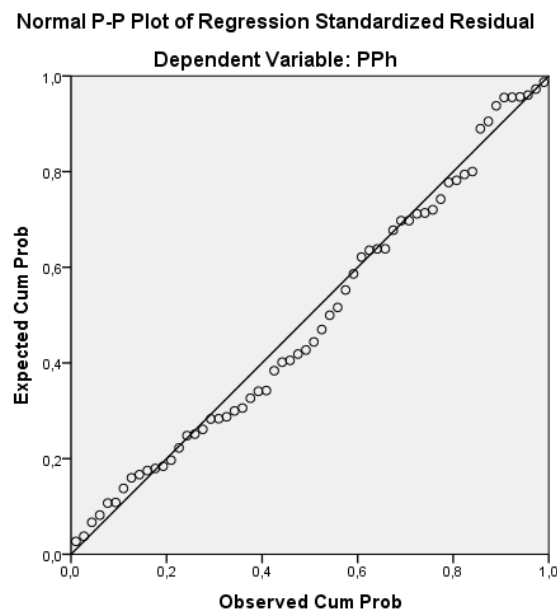
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angsuran penerimaan pajak penghasilan yang paling signifikan diterima pada periode tahun 2011 ke tahun 2012 dengan selisih sebesar Rp.80.857,6 milyar, sedangkan angsuran penerimaan pajak penghasilan paling sedikit diterima pada periode tahun 2013 ke tahun 2014 dengan selisih sebesar Rp. 52.861 milyar.

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011: 160). Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan dua cara. Cara termudah untuk melakukan uji normalitas adalah menggunakan analisis grafik histogram. Namun uji normalitas dengan analisis grafik dinilai kurang mampu mencerminkan hasil yang sebenarnya karena keterbatasan pembaca dalam menafsirkan grafik histogram, khususnya untuk penggunaan sampel yang kecil. Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis statistik dalam melakukan uji normalitas, dengan tujuan hasil pengujian yang lebih akurat. Berikut ini hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti menggunakan aplikasi SPSS:



Gambar 9. Uji Normalitas
Sumber: *Lampiran 4 (2016)*

Output tampilan SPSS di atas dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Multikoloneartas

Ghozali (2011: 105) menjelaskan bahwa uji multikoloneartas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah model regresi yang antar variabel independennya tidak memiliki hubungan korelasi. Terdapat beberapa kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel independen, salah satunya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya serta *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sedangkan *tolerance*

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Berikut ini hasil uji multikolonieritas terhadap data yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel 6. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PDB	,816	1,225
Inf	,967	1,035
BI	,836	1,197

a. Dependent Variable: PPh

Sumber: *Lampiran 5 (2016)*

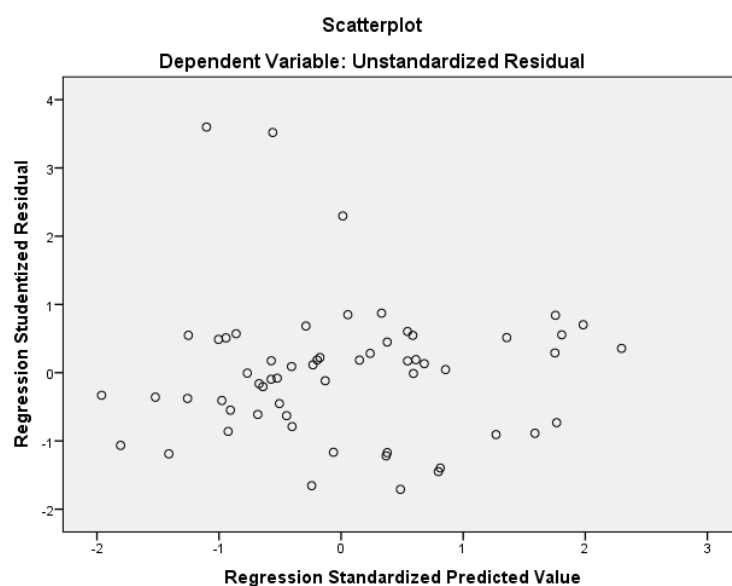
Melihat tabel hasil uji multikolonieritas di atas tercermin bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Selain itu, hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap maka disebut dengan homoskedastisitas, jika berbeda maka dinyatakan dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mengandung homoskedastisitas, bukan mengandung heteroskedastisitas. Ada beberapa cara melakukan uji heteroskedastisitas, salah satunya adalah dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* adalah dengan melihat pola-pola yang dihasilkan. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas yang telah penulis lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS:



Gambar 10. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: *Lampiran 4 (2016)*

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011: 110), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Masalah autokorelasi biasanya muncul pada data *time series* karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Terdapat beberapa metode dalam menguji autokorelasi suatu model regresi linier. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test) dengan aplikasi SPSS yang menghasilkan output data sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,961 ^a	,924	,920	,05090	1,774

a. Predictors: (Constant), BI, Inf, PDB

b. Dependent Variable: PPh

Sumber: *Lampiran 5 (2016)*

Hasil pengujian autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan hasil DW sebesar 1,774, nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tabel yaitu du 1,727 dan lebih kecil daripada 4-du yaitu 2,273 dengan menggunakan signifikansi 5% dengan jumlah sampel 60 ($n=60$) dan jumlah variabel 5 ($k=5$). Hal ini

mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Linier Berganda Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Variabel independen yang digunakan berjumlah tiga variabel, sedangkan variabel dependen berjumlah satu variabel. Oleh karena itu, formula statistika yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda					
Model		Standardized Coefficients		t	Sig.
		Beta			
1	(Constant)			4,691	,000
	PDB		1,022	25,136	,000
	Inf		-,084	-2,245	,029
	BI		-,144	-3,575	,001
Konstanta				4,861	
R				0,961	
Adjusted R Square				0,920	
F Hitung				228,468	
Sig. F				0,000	
N				60	

a. Dependent Variable: PPh

Sumber: *Lampiran 5 (2016)*

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat diaplikasikan ke dalam persamaan regresi, yaitu:

$$Y = 1,022X_1 - 0,084X_2 - 0,144X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki arah yang positif dan berbanding lurus dengan variabel penerimaan pajak penghasilan (Y). Sedangkan variabel inflasi (X_2) dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) memiliki arah yang negatif dan berbanding terbalik dengan variabel penerimaan pajak penghasilan (Y). Dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi linier variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) adalah 1,022 berarti pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Koefisien tersebut mengindikasikan bahwa setiap 1 satuan kenaikan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak penghasilan sebesar 1,022 satuan. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka berakibat pula terhadap penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 1,022 satuan. Hal ini berlaku dengan asumsi inflasi dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tetap.
- b. Koefisien regresi linier variabel inflasi (X_2) adalah -0,084 berarti inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selanjutnya dapat diketahui bahwa setiap 1 satuan kenaikan inflasi, mengakibatkan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar -0,084 satuan. Begitu pula sebaliknya, setiap 1 satuan penurunan inflasi

mengakibatkan -0,084 satuan kenaikan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berlaku dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia tetap.

- c. Koefisien regresi linier variabel tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) adalah -0,144 berarti tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal dapat diartikan bahwa setiap 1 satuan peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar -0,144 satuan. Sebaliknya jika suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak penghasilan akan mengalami peningkatan sebesar -0,144 satuan. Hal ini berlaku dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Uji statistik F (uji signifikansi simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam penelitian yang digunakan sebagai model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Sesuai dengan fungsinya, uji F dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah semua variabel ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), tingkat suku bunga Sertifikat Bank

Indonesia (X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Uji F dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya yaitu:

H_1 : Diduga pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Uji F dilakukan menggunakan aplikasi SPSS yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,776	3	,592	228,468	,000 ^b
	Residual	,145	56	,003		
	Total	1,921	59			

a. Dependent Variable: PPh

b. Predictors: (Constant), BI, Inf, PDB

Sumber: *Lampiran 5*

Pengujian dilakukan dengan kriteria $\alpha = 0.05$ (5%), $F_{\text{tabel}} = 2,76$ dan hipotesis akan diterima dengan syarat $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh F_{hitung} sebesar $228,468 > 2,76$ dan probabilitas $0,000 < \alpha 0.05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 dapat diterima berarti variabel ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

b. Uji t Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Uji statistik t (uji signifikan parameter individual) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui apakah variabel independen berupa pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan (Y).

Uji t dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya yaitu:

H_2 : Diduga pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan kriteria pengujian adalah $\alpha = 0.05$ (5%), $t_{tabel} = 2,000$ dan hipotesis akan diterima dengan syarat $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$. Hasil pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pengujian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi menghasilkan t sebesar 25,136 dengan signifikansi $\alpha < 0.05$ yaitu 0.000 yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak

dan H_2 diterima, variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

2) Inflasi (X_2)

Pengujian terhadap variabel inflasi menghasilkan t sebesar -2,245 dengan signifikansi $\alpha < 0.05$ yaitu 0.029 yang berarti bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, variabel inflasi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

3) Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3)

Pengujian terhadap variabel tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia menghasilkan t sebesar -3,575 dengan signifikansi $\alpha < 0.05$ yaitu 0.001 yang berarti bahwa variabel tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, variabel tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2) Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Dalam penelitian ini,

koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen berupa pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan (Y). Nilai koefisien determinasi diperoleh dari serangkaian pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat berdasarkan *adjusted R square* sebesar 0,920. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mampu menerangkan variasi atau memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar 92% dan sisanya sebesar 8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut diantaranya berupa jumlah wajib pajak, surat setoran pajak, surat pemberitahuan, surat teguran, surat paksa, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak (Qomaria (2010), Hariyanto (2014), Amanah (2015)). Terdapat pula variabel lain yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar, ekspor impor, dan harga minyak mentah dunia (Sinaga, 2010).

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Kondisi Ekonomi Makro dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Indonesia

a. Gambaran Kondisi Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang ditunjukkan melalui Produk Domestik Bruto, secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga 2014. Namun apabila dicermati, ada kalanya Produk Domestik Bruto

mengalami penurunan, walaupun tidak signifikan. Telah disajikan sebelumnya pada gambar 5 bahwa Produk Domestik Bruto di Indonesia berjalan secara fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2014.

Naik turunnya Produk Domestik Bruto di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Produk Domestik Bruto mengalami kenaikan pada saat kondisi perekonomian negara stabil, artinya negara tidak sedang mengalami krisis ekonomi. Namun krisis ekonomi global yang terjadi sejak 2008 mau tidak mau berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, menyebutkan krisis global menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, sehingga ekspor menurun dan impor meningkat. Selain itu, penurunan Produk Domestik Bruto juga disebabkan oleh belanja pemerintah yang menurun karena adanya efisiensi dan moratorium. Ditambah lagi menurut Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, Produk Domestik Bruto dipengaruhi oleh resiko *capital inflow* dan perang mata uang, yakni pelonggaran moneter Amerika Serikat yang semakin menguatkan aliran dana masuk modal asing sehingga memberi tekanan apresiasi nilai tukar rupiah.

b. Gambaran Kondisi Inflasi (X_2)

Inflasi di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2014 berlangsung secara fluktuatif. Telah disajikan sebelumnya pada gambar 6 bahwa selama tahun 2012 inflasi Indonesia relatif terkendali, artinya tidak ada pelonjakan atau penurunan inflasi secara tajam pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni faktor musim yang memberikan dampak pada harga komoditi bahan pangan

terkendali, terutama komoditi beras dan harga komoditas pangan global impor cenderung turun seperti harga kedelai. Faktor lain yaitu penundaan kenaikan tarif listrik dan harga BBM bersubsidi dinilai mengurangi tekanan inflasi pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kenaikan dan penurunan inflasi Indonesia terjadi secara tajam pada tahun 2013. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, kenaikan harga BBM menjadi pemicu utama kenaikan inflasi pada bulan Juli 2013, mencapai 3,29 persen. Kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga-harga komoditas lain, termasuk harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi umum. Pada bulan September 2013 Indonesia mengalami deflasi 0,35 persen. Hal ini terjadi karena pada bulan itu harga-harga telah kembali turun, terutama harga komoditas bahan pokok dan tarif transportasi umum. Pada akhir tahun 2014 inflasi kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi, disebabkan oleh harga BBM yang kembali naik di tahun tersebut.

c. Gambaran Kondisi Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X₃)

Selama tahun 2010 hingga 2014, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan. Gambar 7 telah menyajikan fluktuasi tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia selama tahun tersebut. Bank Indonesia menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga dengan tujuan menjalankan kebijakan moneter.

Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga pada akhir 2011. Hal ini dilakukan sejalan dengan inflasi yang rendah pada saat itu sekaligus untuk

memperbaiki struktur bunga jangka pendek, panjang, dan menengah. Penurunan *BI rate* tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk krisis ekonomi global yang turut melanda Indonesia kala itu.

Di pertengahan tahun 2013, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga didasari oleh kondisi ekonomi global yang sedang krisis karena Indonesia saat itu sedang mengalami defisit neraca transaksi berjalan. Gubernur Bank Indonesia, Agus Marjowardjojo, menjelaskan bahwa tingkat suku bunga perlu dinaikkan dengan pertimbangan masih besarnya defisit transaksi berjalan di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi. Dengan menaikkan tingkat suku bunga, diharapkan defisit transaksi berjalan dapat menurun dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

d. Gambaran Kondisi Penerimaan Pajak Penghasilan (X_4)

Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan sebagaimana telah disajikan di gambar 8. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan sejalan dengan penetapan target penerimaan pajak yang terus meningkat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Peningkatan penerimaan pajak penghasilan dapat dicapai karena beberapa faktor. Beberapa penelitian menyebutkan, secara internal penerimaan pajak didukung oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya, serta keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan upaya ekstensifikasi dan

intensifikasi pajak (Anti, 2010). Selain itu secara eksternal faktor-faktor perekonomian negara juga mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. pertumbuhan ekonomi negara yang membaik, inflasi yang terkendali, dan faktor ekonomi lainnya menjadi pendorong peningkatan penerimaan pajak penghasilan (Megayanti, 2010).

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Secara Simultan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab salah satu dugaan yang telah dibuat dengan hipotesis H_1 yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan hasil uji F yaitu $228,468 > F_{hitung}$ dengan signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar 92% dan sisanya sebesar 8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut adalah nilai kurs, nilai impor, harga minyak mentah dunia (Sinaga, 2010 dan Ferdiawan, 2015).

Sesuai dengan bidangnya, ekonomi makro bertujuan untuk memahami peristiwa atau fenomena ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi pada sektor agregatif (Putong, 2013: 273). Untuk mencapai tujuan tersebut dijalankan beberapa kebijakan ekonomi makro, diantaranya adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dijalankan pemerintah di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Menurut pandangan Keynes, di saat pendapatan nasional naik dan penggunaan tenaga kerja tinggi, pajak penghasilan perlu diturunkan. Penurunan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan efektif). Selanjutnya pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk membeli barang modal maupun menambah investasi. Pada saat kesempatan kerja terserap penuh dan harga-harga barang naik secara pesat, maka pajak penghasilan perlu dinaikkan. Langkah ini akan mengurangi pengeluaran agregat dan menekan inflasi.

Kebijakan moneter dijalankan pemerintah dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk memengaruhi penanaman modal (investasi). Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal yang dilakukan (Sukirno, 2006: 24). Dengan demikian salah satu cara pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah dengan memengaruhi suku bunga untuk penanaman modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2006), Sinaga (2010), Rismawati (2013), Ferdiawan (2014), dan Megayanti (2010) yang secara umum menyatakan bahwa variabel ekonomi makro berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Inflasi (X_2), dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Secara Parsial

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Uji t telah dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil t sebesar $25,136 > t_{hitung}$ dengan signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Salah satu indikasi perekonomian mengalami pertumbuhan adalah bertambahnya kualitas dan kuantitas faktor-faktor produksi yang ada di dalamnya (Sukirno, 2006: 23). Peningkatan kualitas produksi memerlukan jumlah tenaga kerja yang besar. Dengan kata lain, kesempatan kerja dapat terserap penuh. Penerimaan pajak penghasilan dapat ditingkatkan dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap. Selain itu, bertambahnya kualitas faktor-faktor produksi akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga konsumsi masyarakat akan meningkat. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan.

Menurut Mankiw (2006: 5), Produk Domestik Bruto mengukur dua hal pada saat bersamaan: total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total belanja negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Produk Domestik Bruto dihitung dengan menjumlahkan komponen konsumsi (C),

investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Setiap komponen tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Apabila konsumsi rumah tangga naik, baik atas barang maupun jasa, maka akan menaikkan penerimaan pajak penghasilan. Jika investasi naik, maka perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak penghasilan. Belanja pemerintah mencakup pembayaran gaji pegawai negeri dan belanja modal. Kedua hal ini otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Ekspor neto adalah nilai ekspor setelah dikurangi nilai impor. Peningkatan ekspor akan disertai dengan peningkatan pajak penghasilan atas perusahaan yang melakukan ekspor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ekonomi yang bertumbuh dengan terkendali akan meningkatkan pajak yang diterima negara. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha untuk mendorong perekonomiannya agar bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud jika perekonomian suatu negara berada dalam kondisi stabil. Perekonomian yang stabil bukanlah perekonomian yang selalu mengalami pertumbuhan yang terus menerus (tidak pernah terjadi penurunan), namun perekonomian yang mampu menjaga fluktuasi variabel-variabel ekonomi di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah berusaha agar perekonomian negaranya tetap berada dalam kondisi keserasian terutama antara pertumbuhan jumlah penduduk, harga komoditi secara umum, penambahan kapasitas produksi, tersedianya dana untuk investasi (dengan program penggalakan tabungan masyarakat), dan tingkat pendapatan (Putong, 2013).

Hasil yang ditunjukkan oleh pengujian tersebut mendukung penelitian Megayanti (2010) yang menyatakan bahwa PDB mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Megayanti menjelaskan semakin tinggi jumlah Produk Domestik Bruto maka semakin tinggi jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh berbagai sektor usaha, berarti semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diperoleh. Hal ini mendukung oleh penelitian Rismawati (2013) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan pajak penghasilan.

b. Pengaruh Inflasi (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Ada tidaknya pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan dapat diketahui dengan uji t. Hasil dari pengujian tersebut adalah t sebesar $-2,245 > t_{hitung}$ dengan signifikansi $0,029 < \alpha 0,05$. Hal ini berarti bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Sukirno (2006: 339), inflasi yang tinggi akan menghambat perkembangan ekonomi. Hal ini terjadi karena biaya yang terus menerus naik akan mengakibatkan produksi menurun, sehingga para pemilik modal (investor) lebih memilih menggunakan uangnya untuk berspekulasi atau berinvestasi di bidang properti, bukan di bidang produksi. Sebagai akibatnya, kegiatan produksi menjadi terhambat dan pengangguran akan bertambah. Bertambahnya jumlah pengangguran akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak penghasilan.

Inflasi yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek buruk pula terhadap konsumsi masyarakat. Harga-harga yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat enggan dan tidak mampu membelanjakan uangnya untuk membeli kebutuhan barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat menurun, yang akan mengurangi penerimaan pajak penghasilan. Dalam skala internasional, inflasi yang tinggi menurunkan ekspor karena harga barang-barang di negara tersebut tidak dapat bersaing di pasar internasional. Sebaliknya, impor akan naik karena harga barang-barang dari luar negeri menjadi lebih murah. Hal ini akan mengganggu produktivitas dalam negeri yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak penghasilan.

Penerimaan pajak penghasilan akan maksimal jika inflasi terkendali. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi, agar tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Inflasi dapat dikendalikan dengan cara melakukan kebijakan ekonomi, utamanya kebijakan moneter. Menurut Putong (2013) kebijakan moneter dilakukan dengan beberapa tindakan, diantaranya operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto. Tindakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan memperjual-belikan surat-surat berharga. Jika terjadi inflasi (jumlah uang beredar terlalu banyak), maka Bank Indonesia akan menjual surat berharga atau menaikkan suku bunga. Dengan demikian maka bank-bank umum akan menggunakan dananya untuk membeli surat berharga tersebut. Sebaliknya saat terjadi deflasi (jumlah uang beredar terlalu sedikit), maka Bank Indonesia akan membeli surat berharga dari bank umum atau menurunkan suku bunga. Dengan

demikian maka bank umum akan menjual surat berharga dari Bank Indonesia atau menarik dana simpanan yang ada di Bank Indonesia, sehingga uang yang beredar bertambah.

Selain kebijakan di atas, dapat juga dilakukan dengan merubah cadangan minimum. Bila terjadi inflasi maka Bank Indonesia dapat meningkatkan cadangan minimum milik bank umum, sehingga likuiditas bank umum menurun dan akan lebih berhati-hari dalam memberikan kreditnya karena bank harus menahan uang di bank lebih banyak. Sebaliknya bila terjadi deflasi dan bank tersebut tidak likuid dalam arti kesulitan memberikan kredit potensial, maka Bank Indonesia dapat menurunkan cadangan minimum milik bank umum.

Kebijakan moneter lainnya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi adalah dengan melakukan pengawasan pinjaman selektif, yaitu Bank Indonesia memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Misalnya prioritas bagi pengusaha kecil dan ketat untuk kredit yang bersifat konsumtif dan jenis property (Putong, 201: 323).

Dapat disimpulkan bahwa semakin tingkat inflasi bertambah tinggi (tak terkendali) mengakibatkan semakin berkurangnya penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi dan pajak penghasilan memiliki hubungan negatif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Megayanti (2010) yang membuktikan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selanjutnya Pratama (2016) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tingkat inflasi yang stabil tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

penghasilan. Inflasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan apabila tingkatannya menjadi tidak terkendali karena pengangguran dan kemiskinan semakin banyak sehingga membuat penerimaan pajak penghasilan menjadi berkurang.

c. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan pajak penghasilan, diperoleh hasil t sebesar $-3,575 > t_{hitung}$ dengan signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$. Hal ini berarti bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Sukirno (2006:25) tingkat suku bunga berhubungan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika tingkat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan cenderung menggunakan uangnya untuk meningkatkan tabungan. Saat masyarakat memutuskan untuk lebih banyak menabung daripada membelanjakan uangnya, maka konsumsi masyarakat akan menurun. Konsumsi yang menurun akan membuat produktivitas perusahaan terhambat. Oleh karena itu, pengangguran akan meningkat karena perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk memproduksi. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah perlu menurunkan suku bunga. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penanaman modal (investasi). Saat investasi meningkat, perusahaan mempunyai modal untuk melakukan produksi, sehingga produksi meningkat. Peningkatan

produksi berarti tenaga kerja terserap dan pengangguran menurun. Penerimaan pajak penghasilan akan bertambah jika masyarakat memperoleh pendapatan atas pekerjaannya.

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia perlu dikendalikan sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Menurut Putong (2013) saat jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka Bank Indonesia perlu menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi dan yang dimiliki oleh bank umum, karena bank umum akan cenderung menggunakan dananya untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan membuat bank-bank umum juga ikut menaikkan suku bunga tabungan dan kredit. Tingginya suku bunga tersebut akan membuat masyarakat memilih untuk menabungkan uangnya daripada mengajukan kredit. Sehingga peredaran jumlah uang dapat ditekan.

Tindakan sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, perlu dilakukan saat jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit. Menurut Putong (2013) saat tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun, bank umum akan menjual kembali surat berharga yang dimilikinya kepada Bank Indonesia dan akan menarik kembali dananya yang tersimpan pada Bank Indonesia. Dengan demikian maka likuiditas bank umum akan meningkat. Jika tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun, maka bank-bank umum akan menurunkan suku bunga tabungan dan kredit. Sehingga masyarakat akan akan

mengurangi tabungan yang ada pada bank dan lebih memilih untuk mengajukan kredit potensial.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan, dan tingkat suku bunga yang rendah dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Maka tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ferdiawan (2015) yang membuktikan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun maka penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak penghasilan selama tahun 2010 hingga 2014, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi makro di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2014 pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berlangsung secara fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi selama Juli hingga September 2014, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi selama Januari hingga Maret 2010. Inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2013, sedangkan inflasi terendah terjadi pada September 2013. Tingkat suku bunga terendah terjadi selama Februari 2012 hingga Mei 2013, sedangkan tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada November dan Desember 2014. Berbeda halnya dengan penerimaan pajak penghasilan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Pengaruh variabel ekonomi makro secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan penelitian terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi kenaikan penerimaan pajak penghasilan.

b. Inflasi

Berdasarkan penelitian terbukti bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, jika inflasi mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan.

c. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

Berdasarkan penelitian terbukti bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, jika tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan melakukan analisis dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian membuktikan bahwa keberadaan variabel ekonomi makro berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sebaiknya pemerintah memperhatikan variabel ekonomi makro yang ada dalam menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya agar lebih realistis sesuai dengan kondisi perekonomian negara secara makro. Target yang realistis dan dapat tercapai akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal dan fungsi *budgetair* serta *regulerend* pajak.

Pemerintah seharusnya terus mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga keserasian antara pertumbuhan jumlah penduduk, harga komoditi secara umum, penambahan kapasitas produksi, ketersediaan dana investasi, dan tingkat pendapatan. Pemerintah seharusnya mampu mengendalikan inflasi dengan melakukan kebijakan ekonomi moneter diantaranya operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto, menyesuaikan cadangan minimum bank, dan melakukan pengawasan pinjaman selektif. Pemerintah seharusnya mampu mengendalikan tingkat suku bunga agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lanjutan atas penelitian ini dengan menggunakan variabel lain atau penambahan variabel bebas seperti harga minyak mentah, harga emas, nilai ekspor impor dan variabel terikat tidak hanya penerimaan

pajak penghasilan saja namun seluruh penerimaan pajak. Penelitian sebaiknya melibatkan sampel yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh menjadi lebih valid, sehingga dapat dijadikan referensi pemerintah dalam menargetkan penerimaan pajak yang lebih realistis dan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djohanputro, Bramantyo. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar dan Dawn Porter. 2009. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill
- Halim, Abdul, Ick Rangka Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Joesoef, Jose Rizal. 2008. *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, Gregory N. 2004. *Principles of Economics*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd.
- _____. 2007. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- McConnell, Campbell R. and Stanley L. Brue. 2005. *Macroeconomics*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nainggolan, Kaman dkk. 2005. *Teori Ekonomi Makro Edisi Pertama*. Bantul: Podok Edukasi.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reksoprayitno, Soediyono. 2011. *Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan-Pernawaran Agregatif*. Yogyakarta: BPFE.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Budi. 2013. *Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21*. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suseno. 1997. *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

THESIS, SKRIPSI, DAN JURNAL

- Anti, Mawar Warih. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ferdiawan, Mohammad Andika. 2015. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikasi Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Hidayat, Khomarul. 2006. *Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Dolar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Megayanti, Ambar Nur. 2010. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga SBI, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Pratama, Nicola Putra. 2016. *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Rismawati, Wenni. 2013. *Pengaruh Variabel Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus: Tahun 2001-2012)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sinaga, Andar Rohnal. 2010. *Pengaruh Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

INTERNET

Badan Pusat Statistik. 2015. *Realisasi Penerimaan Negara*. Diakses pada 26 Desember 2015 dari <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>

Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia*. Diakses pada 15 Maret 2016 dari <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/907>

Badan Pusat Statistik. 2016. *Penggunaan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan*. Diakses pada 15 Maret 2016 dari <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1220>

Bank Indonesia. 2016. *Fungsi Bank Indonesia*. Diakses pada 29 Februari 2016 dari <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2016. *Data BI Rate*. Diakses pada 29 Februari 2016 dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2016. *Informasi Kurs*. Diakses pada 29 Februari 2016 dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2016. *Transmisi Kebijakan Moneter*. Diakses pada 28 Maret 2016 dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx>

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Penerimaan Pajak*. Diakses pada 4 Februari 2016 dari <http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak>

Kompas. 2013. *Harga BBM Naik, Inflasi Juni 1,03 Persen*. Diakses pada 28 Maret 2016 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/01/1142436/Harga.BBM.Naik.Inflasi.Juni.1.03.Persen>

Kompas. 2013. *Ini Dampak Kenaikan BI Rate*. Diakses pada 28 Maret 2016 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/13/0740572/Ini.Dampak.Kenaikan.BI.Rate>

Liputan 6. 2014. *Ini Penyebab Utama Inflasi November 2014 Paska BBM Naik*. Diakses pada 28 Maret 2016 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2140924/ini-penyebab-utama-inflasi-november-2014-paska-bbm-naik>

Detik. 2013. *Ini Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Rontok di Bawah 6%*.

Diakses pada 28 Maret 2016 dari

<http://finance.detik.com/read/2013/08/02/115934/2322517/4/ini-penyebab-pertumbuhan-ekonomi-ri-rontok-di-bawah-6>

Lampiran 1. Data Variabel X

Tahun	Bulan	PDB	LN PDB	Inflasi	BI Rate	BI Rate Per Bulan
2010	Jan	186561133333333	32,85978	0,84	6,5	0,541666667
	Feb	186561133333333	32,85978	0,3	6,5	0,541666667
	Mar	186561133333333	32,85978	-0,14	6,5	0,541666667
	Apr	191570933333333	32,88628	0,15	6,5	0,541666667
	Mei	191570933333333	32,88628	0,29	6,5	0,541666667
	Jun	191570933333333	32,88628	0,97	6,5	0,541666667
	Jul	198083533333333	32,91971	1,57	6,5	0,541666667
	Agt	198083533333333	32,91971	0,76	6,5	0,541666667
	Sep	198083533333333	32,91971	0,44	6,5	0,541666667
	Okt	195270666666667	32,90541	0,06	6,5	0,541666667
	Nov	195270666666667	32,90541	0,6	6,5	0,541666667
	Des	195270666666667	32,90541	0,92	6,5	0,541666667
2011	Jan	198573933333333	32,92218	0,89	6,5	0,541666667
	Feb	198573933333333	32,92218	0,13	6,75	0,5625
	Mar	198573933333333	32,92218	-0,32	6,75	0,5625
	Apr	204166866666667	32,94996	-0,31	6,75	0,5625
	Mei	204166866666667	32,94996	0,12	6,75	0,5625
	Jun	204166866666667	32,94996	0,55	6,75	0,5625
	Jul	210941300000000	32,9826	0,67	6,75	0,5625
	Agt	210941300000000	32,9826	0,93	6,75	0,5625
	Sep	210941300000000	32,9826	0,27	6,75	0,5625
	Okt	207839933333333	32,96779	-0,12	6,5	0,541666667
	Nov	207839933333333	32,96779	0,34	6	0,5
	Des	207839933333333	32,96779	0,57	6	0,5
2012	Jan	211133366666667	32,98351	0,76	6	0,5
	Feb	211133366666667	32,98351	0,05	5,75	0,479166667
	Mar	211133366666667	32,98351	0,07	5,75	0,479166667
	Apr	217108933333333	33,01142	0,21	5,75	0,479166667
	Mei	217108933333333	33,01142	0,07	5,75	0,479166667
	Jun	217108933333333	33,01142	0,62	5,75	0,479166667
	Jul	224036233333333	33,04283	0,7	5,75	0,479166667
	Agt	224036233333333	33,04283	0,95	5,75	0,479166667
	Sep	224036233333333	33,04283	0,01	5,75	0,479166667
	Okt	220698800000000	33,02782	0,16	5,75	0,479166667
	Nov	220698800000000	33,02782	0,07	5,75	0,479166667

	Des	220698800000000	33,02782	0,54	5,75	0,479166667
2013	Jan	223773433333333	33,04166	1,03	5,75	0,479166667
	Feb	223773433333333	33,04166	0,75	5,75	0,479166667
	Mar	223773433333333	33,04166	0,63	5,75	0,479166667
	Apr	229508866666667	33,06696	-0,1	5,75	0,479166667
	Mei	229508866666667	33,06696	-0,03	5,75	0,479166667
	Jun	229508866666667	33,06696	1,03	6	0,5
	Jul	236559933333333	33,09722	3,29	6,5	0,541666667
	Agt	236559933333333	33,09722	1,12	6,75	0,5625
	Sep	236559933333333	33,09722	-0,35	7,25	0,604166667
	Okt	233175433333333	33,08281	0,09	7,25	0,604166667
	Nov	233175433333333	33,08281	0,12	7,5	0,625
	Des	233175433333333	33,08281	0,55	7,5	0,625
2014	Jan	235311433333333	33,09193	1,07	7,5	0,625
	Feb	235311433333333	33,09193	0,26	7,5	0,625
	Mar	235311433333333	33,09193	0,08	7,5	0,625
	Apr	241137266666667	33,11639	-0,02	7,5	0,625
	Mei	241137266666667	33,11639	0,16	7,5	0,625
	Jun	241137266666667	33,11639	0,43	7,5	0,625
	Jul	248383800000000	33,146	0,93	7,5	0,625
	Agt	248383800000000	33,146	0,47	7,5	0,625
	Sep	248383800000000	33,146	0,27	7,5	0,625
	Okt	244894666666667	33,13185	0,47	7,5	0,625
	Nov	244894666666667	33,13185	1,5	7,65	0,6375
	Des	244894666666667	33,13185	2,46	7,75	0,645833333

Lampiran 2. Data Variabel Y

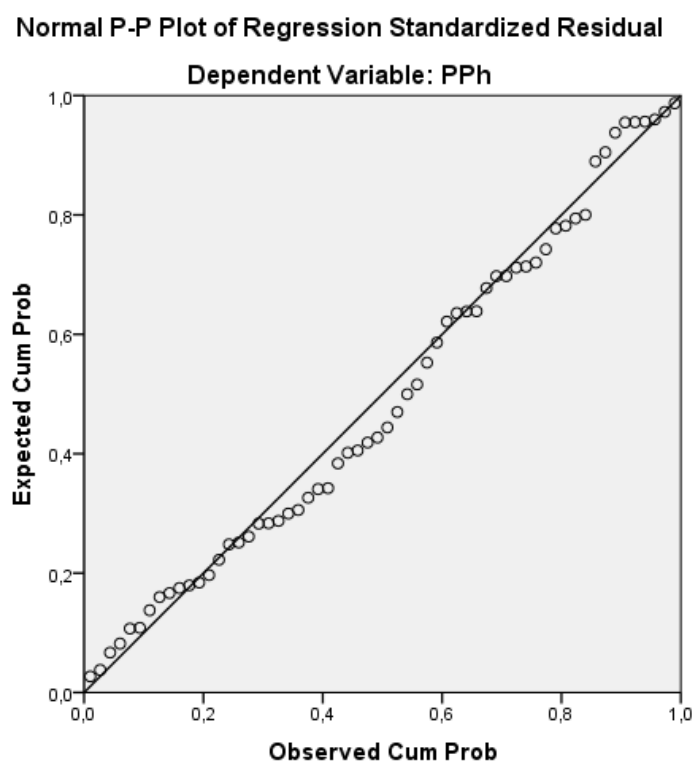
Tahun	Bulan	PPh	LN PPh
2010	Jan	29753790000000	31,02397763
	Feb	29753790000000	31,02397763
	Mar	29753790000000	31,02397763
	Apr	29753790000000	31,02397763
	Mei	29753790000000	31,02397763
	Jun	29753790000000	31,02397763
	Jul	29753790000000	31,02397763
	Agt	29753790000000	31,02397763
	Sep	29753790000000	31,02397763
	Okt	29753790000000	31,02397763
	Nov	29753790000000	31,02397763
	Des	29753790000000	31,02397763
2011	Jan	35998080000000	31,21448672
	Feb	35998080000000	31,21448672
	Mar	35998080000000	31,21448672
	Apr	35998080000000	31,21448672
	Mei	35998080000000	31,21448672
	Jun	35998080000000	31,21448672
	Jul	35998080000000	31,21448672
	Agt	35998080000000	31,21448672
	Sep	35998080000000	31,21448672
	Okt	35998080000000	31,21448672
	Nov	35998080000000	31,21448672
	Des	35998080000000	31,21448672
2012	Jan	42736210000000	31,38606769
	Feb	42736210000000	31,38606769
	Mar	42736210000000	31,38606769
	Apr	42736210000000	31,38606769
	Mei	42736210000000	31,38606769
	Jun	42736210000000	31,38606769
	Jul	42736210000000	31,38606769
	Agt	42736210000000	31,38606769
	Sep	42736210000000	31,38606769
	Okt	42736210000000	31,38606769
	Nov	42736210000000	31,38606769

	Des	42736210000000	31,38606769
2013	Jan	44896670000000	31,43538474
	Feb	44896670000000	31,43538474
	Mar	44896670000000	31,43538474
	Apr	44896670000000	31,43538474
	Mei	44896670000000	31,43538474
	Jun	44896670000000	31,43538474
	Jul	44896670000000	31,43538474
	Agt	44896670000000	31,43538474
	Sep	44896670000000	31,43538474
	Okt	44896670000000	31,43538474
	Nov	44896670000000	31,43538474
	Des	44896670000000	31,43538474
2014	Jan	49301750000000	31,52898069
	Feb	49301750000000	31,52898069
	Mar	49301750000000	31,52898069
	Apr	49301750000000	31,52898069
	Mei	49301750000000	31,52898069
	Jun	49301750000000	31,52898069
	Jul	49301750000000	31,52898069
	Agt	49301750000000	31,52898069
	Sep	49301750000000	31,52898069
	Okt	49301750000000	31,52898069
	Nov	49301750000000	31,52898069
	Des	49301750000000	31,52898069

Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics										
	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
PDB	60	32,86	33,15	1980,70	33,0117	,08479	-,130	,309	-1,145	,608
Inf	60	-,35	3,29	30,90	,5150	,62468	2,015	,309	6,579	,608
BI	60	,48	,65	32,85	,5474	,05562	,220	,309	-1,232	,608
PPh	60	31,02	31,53	1879,07	31,3178	,18045	-,541	,309	-1,084	,608
Valid N (listwise)	60									

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04959209
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,059
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

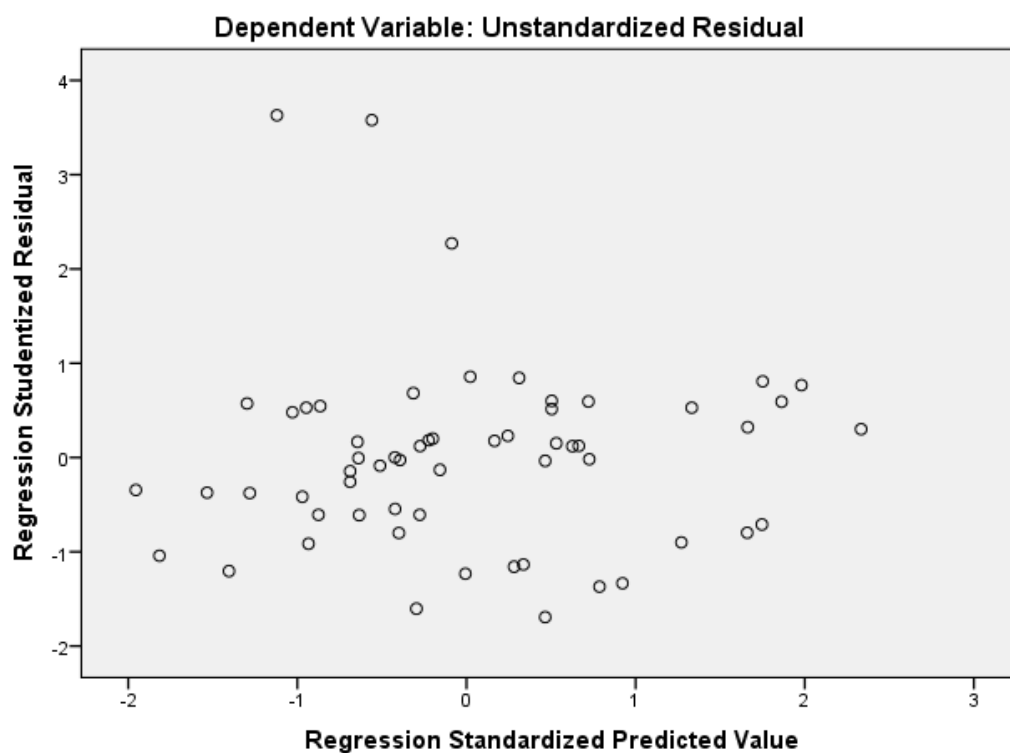
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Scatterplot



Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BI, Inf, PDB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PPh

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,961 ^a	,924	,920	,05090	1,774

a. Predictors: (Constant), BI, Inf, PDB

b. Dependent Variable: PPh

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,776	3	,592	228,468	,000 ^b
	Residual	,145	56	,003		
	Total	1,921	59			

a. Dependent Variable: PPh

b. Predictors: (Constant), BI, Inf, PDB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,861	1,036		4,691	,000		
	PDB	2,175	,087	1,022	25,136	,000	,816	1,225
	Inf	-,024	,011	-,084	-2,245	,029	,967	1,035
	BI	-,466	,130	-,144	-3,575	,001	,836	1,197

a. Dependent Variable: PPh

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PDB	Inf	BI
1	1	3,489	1,000	,00	,00	,03	,00
	2	,505	2,629	,00	,00	,94	,00
	3	,007	23,144	,00	,00	,00	,86
	4	1,961E-5	421,842	1,00	1,00	,02	,14

a. Dependent Variable: PPh

Coefficient Correlations^a

Model			BI	Inf	PDB
1	Correlations	BI	1,000	-,027	-,395
		Inf	-,027	1,000	-,156
		PDB	-,395	-,156	1,000
	Covariances	BI	,017	-3,800E-5	-,004
		Inf	-3,800E-5	,000	,000
		PDB	-,004	,000	,007

a. Dependent Variable: PPh

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	30,9822	31,5796	31,3178	,17350	60
Std. Predicted Value	-1,934	1,509	,000	1,000	60
Standard Error of Predicted Value	,008	,031	,013	,003	60
Adjusted Predicted Value	30,9780	31,5840	31,3177	,17359	60
Residual	-,09823	,11344	,00000	,04959	60
Std. Residual	-1,930	2,228	,000	,974	60
Stud. Residual	-1,969	2,266	,000	1,004	60
Deleted Residual	-,10222	,11730	,00005	,05267	60
Stud. Deleted Residual	-2,022	2,356	,004	1,018	60
Mahal. Distance	,411	20,235	2,950	2,789	60
Cook's Distance	,000	,064	,015	,018	60
Centered Leverage Value	,007	,343	,050	,047	60

a. Dependent Variable: PPh

Lampiran 6. Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama lengkap	: Sukowati Pinilih	
Nama panggilan	: Lilih	
Tempat/tanggal lahir	: Ngawi, 7 April 1994	
Jenis kelamin	: Perempuan	
Agama	: Islam	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Alamat asal	: Walikukun Kulon RT 01 RW 03, Walikukun, Widodaren, Ngawi	
Nomor telepon	: 081216422416	
Email	: sukowatipinilih@gmail.com	

Latar Belakang Pendidikan

2000-2006	: MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun
2006-2009	: SMP Negeri 1 Widodaren
2009-2012	: SMA Negeri 3 Surakarta
2012-2016	: S1 Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Pengalaman Magang

2015	: PT Pupuk Kujang Cikampek
------	----------------------------

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama lengkap : Sukowati Pinilih
Nama panggilan : Lilih
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 7 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Walikukun Kulon RT 01 RW 03, Walikukun,
Widodaren, Ngawi
No telepon : 081216422416
Email : sukowatipinilih@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2000-2006 : MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun
2006-2009 : SMP Negeri 1 Widodaren
2009-2012 : SMA Negeri 3 Surakarta
2012-2016 : S1 Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Pengalaman Magang

2015 : PT Pupuk Kujang Cikampek